

BAB IV

AKAR PRAKTIK MILITERISTIK DI DIKLATSAR MAPALA X

4.1 Pengantar

Sejarah mencatat, mahasiswa dan militer secara historis menunjukkan kohesi yang kuat pada masa Demokrasi Terpimpin. Saat itu di tahun 1957, untuk pertama kalinya ABRI mulai melirik mahasiswa sebagai partner dalam upaya mengatasi pertentangan ideologis. Partner kerjasama antar ABRI dan mahasiswa ini terbentuk dalam Badan Kerja Sama Pemuda Militer. ABRI juga menunjukkan simpatik besar terhadap gerakan mahasiswa. Paling tidak sikap ini dibuktikan melalui tidak adanya larangan demonstrasi oleh pihak militer¹.

Kohesi yang kuat antara mahasiswa dan militer tidak berlangsung lama. Menginjak pertengahan tahun 1970-an, hubungan yang terjalin harmonis kemudian pecah. Berbagai gerakan mahasiswa menyeruak. Mereka turun kejalan-jalan, mengkritisi laju pemerintahan yang semakin bernetamorfosa menjadi rezim sentralistik dan militeristik. Meskipun begitu, jika kita merujuk historiografi ataupun kesaksian yang muncul pasca tumbanganya rezim Orde Baru, banyak sejarawan,

¹ Fachry Ali, *Mahasiswa, Sistem Politik di Indonesia dan Negara*, Inti Sarana Aksara, Jakarta, 1985, h. 19.

wartawan ataupun mahasiswa yang mengemukakan Orde Baru tidak kehabisan cara untuk menghegemoni masyarakatnya termasuk mahasiswa.

Militer selaku alat kekerasan negara yang legal masuk ke kampus-kampus, memburu, menangkap dan menembaki para mahasiswa yang dianggap mengancam stabilitas negara. Adalah Enin Supriyanto, Hilmar Farid, dan sebagainya, merupakan sederet nama aktivis mahasiswa yang pernah menjadi tahanan politik karena mengkritisi pemerintahan. Selain cara represif, cara haluspun dilakukan oleh militer dibawah rezim Orde Baru, salah satunya ialah melalui narasi sejarah. Narasi sejarah atau dikenal dengan historiografi Indonesia diproduksi dan direproduksi guna melanggengkan status quo pemerintah. Sehingga yang terjadi ialah, sejarah telah menjadi sebuah ideologi praktis yang sarat kepentingan penguasa.

Lantas apakah karena hal-hal tersebut fenomena praktik militeristik dalam Mapala X dapat dipahami? Mengingat sudah sepuluh tahun lebih Indonesia meninggalkan rezim yang militeristis, dan sudah berganti menjadi negara reformis demokratik. Tumbangnya rezim Orde semakin banyak usaha untuk mengurangi peran militer, bahkan secara formal Dwif Fungsi ABRI sudah dihapuskan. Namun fenomena praktik militeristik yang terjadi di Mapala X, bisa menjadi semacam penanda, bahwa beberapa bagian dari yang ‘lama’ masih terasa melekat pada yang baru. Suatu fenomena dimana nilai-nilai militerisme masih bertahan di kalangan masyarakat maupun mahasiswa.

Oleh karena itu penulis merasa perlu membuka tabir sejarah secara mendalam. Tidak hanya sebatas mengeksplorasi sejarah Mapala X sebagai objek penelitian, namun berusaha mencari kaitan struktur sosial politik berpuluh-puluh tahun yang lalu, sebagai bagian yang dirasa tidak terpisahkan dari sebuah fenomena sosial yang masih dapat kita jumpai sekarang. Singkatnya untuk mendapatkan gambaran yang detail, penulis berusaha mencari akar praktik militeristik di Mapala X.

Bab ini terbagi menjadi beberapa sub bab. Sub bab pertama membicarakan Penetrasi negara militer birokratik di Mapala X. Sub bab kedua membicarakan model pendidikan militeristik sebagai dampak politik pencitraan yang dilakukan militer, dan sub bab ketiga membicarakan pendidikan militeristik dan impikasi kekerasan di Mapala X. Sub bab keempat membicarakan pertarungan argumentasi pendidikan militeristik dalam Diklatsar Mapala X. Sub bab terakhir yakni membicarakan refleksi yang terkait antara struktur dengan praktik pendidikan militeristik.

Di sub bab pertama penulis mencoba menguraikan sedikit gambaran lahirnya Orde Baru yang semakin menjelma menjadi pemerintahan militeristik. Di Indonesia praktik pemerintahan militeristik memiliki kohesi dengan kekerasan. Negara sebagai lembaga tertinggi memiliki perangkat kekerasan yang legal. Jika kerajaan memiliki bala tentara, negara memiliki militer. Jika bala tentara dipergunakan kerajaan untuk memperluas wilayah teritori dengan cara berperang, militer dalam sebuah negara digunakan untuk berbagai kepentingan penguasa, seperti memperluas wilayah

jajahan, mempertahankan kekuasaan, atau melakukan berbagai praktek kekerasan dengan rakyatnya sendiri atas nama stabilitas ataupun menjaga keutuhan negara.

Kemudian masih di sub bab pertama, penulis juga membicarakan penetrasi negara birokratik militer di Mapala X, sebetulnya relasi militer dengan mahasiswa. Sebagaimana yang diungkap pada paragraf sebelumnya, militer dan mahasiswa memiliki kohesi yang cukup kuat. Namun ketika Indonesia berubah menjadi negara militer birokratik, dan melenceng jauh dari amanat konstitusi, timbulah keretakan antar keduanya. Mahasiswa yang dianalogikan mirip sebagai intelektual resi dalam konsepsi kekuasaan di lingkungan budaya feodal-kolonial Jawa, serta kekuatan moral (*moral force*), merasa memiliki andil sebagai anjing penjaga (*watch dog*) terhadap jalannya laju pemerintahan. dalam konteks Indonesia mahasiswa memang kerap didefinisikan secara politik, secara sosiologis mahasiswa dapat didefinisikan sebagai *youth movement* atau dapat juga dalam istilah ‘pra kelas’.

Sikap kritis mahasiswa yang salah satunya dituangkan dalam gerakan mahasiswa dinilai membahayakan penguasa. Penguasa dalam hal ini pemerintah secara sistematis mulai melakukan pembenahan dan kontrol yang efektif terhadap mahasiswa. Oleh karena itu pemerintah menerapkan kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/ BKK), untuk memukul mundur gerakan mahasiswa, dan mengembalikan mereka kedalam ruang-ruang kampus. Dalam pelaksanaan NKK/ BKK, terdapat sanksi yang berat atas pelanggaran kebijakan NKK/ BKK. Pemecatan dan pengucilan dari dunia pendidikan

tidak segan dilakukan bagi yang melanggar, entah mahasiswa, dosen atau rektor sekalipun.

Perlakuan represif yang diterima mahasiswa melalui birokrasi kampus dan tidak segan menerjunkan aparat militer, berdampak pada timbulnya ketakutan di kalangan mahasiswa jika mereka bersikap kritis. Akibat yang muncul adalah matinya inisiatif mahasiswa untuk menyampaikan gagasan kritis. Selain itu mahasiswa juga harus menghadapi tekanan yang demikian besar dari luar. Inilah yang disebut Enin Supriyanto sebagai faktor yang mengakhiri *student government* di tingkat universitas. Mahasiswa kian merosot moralnya untuk tampil dalam aktivitas politik sebagai “oposisi”. Mahasiswa kehilangan daya untuk mengorganisasikan diri kembali dalam arena *student government*.

Tidak hanya karena faktor NKK/ BKK yang membuat mahasiswa tidak lagi bersikap kritis. Ada kebijakan lain yang mempengaruhi aktivitas kemahasiswaan, antara lain dengan diberlakukannya sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Sistem SKS secara tidak langsung menggiring mahasiswa untuk berkonsentrasi kepada studi. Mekanisme Indeks Prestasi (IP) dan pembatasan masa studi di perguruan tinggi membuat mahasiswa harus lebih serius dan cepat menyelesaikan masa studinya. Dalam situasi tersebut, mulai pertengahan 1980-an mahasiswa memilih aktif di luar kampus, berkelompok secara eksklusif dalam bentuk-bentuk kelompok studi/ diskusi, atau unit-unit kegiatan mahasiswa, seperti pecinta alam, keolahrgaan, dan sebagainya. Hal inilah yang dilakukan oleh mahasiswa di Mapala X, mereka memfokuskan diri

pada kegiatan petualangan alam bebas. Namun ada yang menarik ditengah keretakan hubungan mahasiswa dan militer, Mapala X justru memiliki hubungan harmonis sejak era 1980-an.

Selanjutnya pada sub bab kedua yakni mengenai model pendidikan militeristik sebagai dampak pencitraan militer. Kathrine E. McGregor dalam bukunya mengemukakan bahwa bangunan historiografi Indonesia menyeragamkan cara orang Indonesia memaknai dan merekonstruksikan masa lalunya sebagai buah dari keberhasilan militer menempatkan ideologinya sebagai pusat berpikir historis. Militer sebagai sebuah institusi dan ideologinya telah berhasil membangun citra baik untuk melegitimasi dirinya sendiri maupun kekuasaan yang didukungnya melalui pemaknaan tunggal dan naratif tunggal pada konstruksi masa lalu Indonesia². Adapun narasi sejarah yang tertuang dalam buku maupun film yang mengkritisi pemerintahan, atau sekedar menggambarkan kondisi pemerintahan secara real dilarang beredar. Upaya tersebut mempengaruhi alam bawah sadar masyarakat, sehingga yang terjadi ingatan kolektif massa rakyat terkendalikan oleh nalar militer yang kemudian mempengaruhi tindak laku sebagian masyarakat untuk menciptakan bayangan diri sebagai “mirip-mirip” militer.

Selanjutnya dalam sub bab ketiga membicarakan implikasi kekerasan dari penerapan pendidikan militeristik di Mapala X. Sub bab keempat, penulis membahas pertarungan argumentasi pendidikan militeristik dalam Diklatsar mapala X. Kasus

2 Kathrine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam*, Syarikat, Yogyakarta, 2008, h. xxiii.

kematian siswa yang terjadi di Mapala X mempertemukan sintesis dan antitesisnya dalam ruang lingkup organisasi Mapala X. Diskursus sosial intra organisasi terjadi. Orang-orang berdialog memberikan pandangan-pandangan atas pijakan yang diyakini. Sebagian mempersalahkan, membela, sebagian lain mengamini bahwa kasus kematian merupakan kesalahan semua generasi. Terakhir, di sub bab kelima membicarakan keterkaitan struktur dengan penerapan model pendidikan militeristik di Mapala X. Dengan demikian keseluruhan sub bab yang terangkum dalam bab ini, diharapkan fenomena pendidikan militeristik di Mapala X dapat dikaji dari hulu hingga hilir.

4.2 Penetrasi Negara Birokratik Militer di Mapala X

Sub bab ini akan diawali dengan penjelasan bagaimana struktur sosial politik memainkan peran yang menentukan dalam terciptanya praktik militeristik. Negara birokratik militer atau dikenal dengan Orde Baru merupakan pemerintahan hegemonik yang melancarkan peran dominasi dan hegemoninya mulai dari pemerintahan, desa, hingga dunia kemahasiswaan. Di pemerintahan militeristik birokratik, militerisme tumbuh subur dan berkembang melalui berbagai medium, baik di institusi pendidikan, historiografi Indonesia, pemerintahan, media massa, dan sebagainya. Militerisme juga dapat tampil dalam bentuk yang paling halus, seperti film, dan berbagai doktrinasi yang mengatas namakan pendidikan kebangsaan (P4, Kewiraan, Penataran,dll). Dari sana militer memainkan peran politiknya untuk melakukan pecitraan, dan melanggengkan status quo pemerintah. Dengan pola

konstruksi demikian, maka tercipta univikasi bahwa militer dilihat sebagai *roll* model atau pemimpin terbaik, dan Mapala adalah satu dari sekian banyak Mapala atau organisasi sipil yang terkena dampak ini. Berikut adalah penejelasan mengenai akar praktik militeristik di Mapala X.

4.2.1 Orde Baru; Potret Pemerintahan Birokratik Militer

Menyitir pandangan Richard Robinson, Indonesia semasa rezim Orde Baru merupakan negara birokratik militer (*military bureaucratic state*). Sebuah negara dimana perangkat negara telah didominasi oleh pejabat-pejabat militer dan birokrasi pun membengkak; fungsi partai-partai politik, ormas, dan lembaga politik lainnya juga sudah dirombak.³ Sepak terjang militer dalam panggung politik memang sudah dimulai sebelum pemerintahan Orde Baru. Budi Irwanto⁴ mengatakan, sejak awal militer bukanlah institusi yang pasif. Watak revolusionernya serta operasi yang tidak putus-putusnya dilakukan untuk memadamkan pemberontakkan di daerah mulai tahun 1948, telah menjadikan para perwira mempunyai kesadaran penuh terhadap politik nasional.

Bahkan Crouth⁵ mengungkapkan militer Indonesia mendapat orientasi politik dan kepentingan-kepentingan politiknya tatkala revolusi melawan Belanda. Dalam masa revolusi tahun 1945 sampai 1949, militer terlibat dalam perjuangan kemerdekaan –saat mana tindakan politik dan militer terjalin dan tidak terpisahkan.

³ Budi Irwanto, *Film, Ideologi, dan Militer*, Media Pressindo, Jakarta, 1999, hal 51

⁴ Budi Irwanto, *op. cit.*, 41

⁵ Budi Irwanto, *Film, Ideologi, dan Militer*, Media Pressindo, Jakarta, 1999, h. 42

Perbedaan yang kabur antara tindakan politik dan militer inilah yang membentuk persepsi militer sebagai kekuatan politik. Karena perjuangan kemerdekaan itu sendiri memiliki sifat politik sekaligus militer.

Lebih lanjut Salim Said menjelaskan relasi sipil-militer yang terbentuk dipengaruhi oleh keterlibatan militer dalam politik sejak kelahirannya, dan karena lemahnya politisi sipil. Bagi Said, karakteristik yang unik dari angkatan bersenjata Indonesia adalah: ia membentuk dirinya sendiri. Artinya, ia dibentuk bukan oleh pemerintah atau partai politik. Bahkan ia mengorganisir dirinya dari kekacauan tentara yang dilatih Jepang setelah penyerahan Jepang, dan proklamasi kemerdekaan, ketika pemerintah enggan mengangkat tentara. Akan tetapi peran militer juga dimaknai sebagai tindakan “darurat” yang dipicu oleh kegagalan politisi sipil dalam menata politik nasional. Asumsi dasar argumen ini adalah bahwa militer tidak pernah mempunyai pamrih kekuasaan. Padahal, setelah Proklamasi Kemerdekaan militer berupaya membentuk dirinya sebagai organisasi yang solid.⁶ Keinginan militer inilah yang banyak ditentang oleh para politisi sipil karena akan memberi citra buruk Republik yang baru dibentuk sebagai warisan “pemerintahan fasisme” Jepang.

Letupan ketidakpuasan militer muncul dalam peristiwa 17 Oktober 1952, ketika Nasution dengan beberapa perwira mendesak Presiden Soekarno menggunakan kekuasaannya untuk membubarkan parlemen. Akan tetapi peristiwa ini justru menunjukkan kelemahan militer, sehingga berakhir pada kegagalan, serta

⁶ Budi Irwanto, *Film, Ideologi, dan Militer*, Media Pressindo, Jakarta, 1999, h. 42

menimbulkan resiko berupa diberhentikannya Nasution selama tiga tahun. Dalam periode 1955 hingga 1959 terdapat ketidakpuasan yang hampir menyeluruh pada situasi politik nasional. Beberapa perwira militer merasa bertanggung jawab menyelamatkan situasi politik nasional sebagaimana mereka melakukannya pada revolusi melawan Belanda. Perasaan yang kuat ini mengakibatkan militer terlibat secara mendalam dalam krisis di tahun 1956-1957.

Keterlibatan militer dalam kancah politik nasional semakin menjadi-jadi ketika rezim Orde Baru berkuasa. Salim Said menjelaskan, peristiwa berdarah yang dikenal dengan Gerakan Tiga Puluh September atau Gestapu/ PKI menjadi penghantar yang menguatkan dominasi peran politik ABRI, terutama Angkatan Darat. Peran politik yang dominan tersebut dikonsolidasikan oleh tentara lewat Seminar Angkatan Darat II di Bandung pada bulan Agustus 1966. Hal terpenting yang dihasilkan Seminar Angkatan Darat II adalah keputusan kaum militer Indonesia untuk makin mempengaruhi posisi mereka sebagai kekuatan politik. Berlandaskan posisi demikian itulah TNI Angkatan Darat berketetapan memerintah. Pemerintahan itulah yang kemudian, selama 32 tahun dipimpin oleh Soeharto, dan dikenal sebagai Pemerintahan Orde Baru.⁷ Penggunaan Orde Baru di sini dimaksudkan untuk memperlihatkan adanya sekelompok elite politik sebagai agen perubahan. Sebentuk komitmen sebagai reaksi atas krisis politik dan ekonomi di masa sebelumnya. Maka ada dua tema besar yang di usung rezim ini, yakni demokratisasi politik dan

⁷ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi*, Aksara Karunia, Jakarta, 2002, h. 68.

perbaikan ekonomi yang dirangkum dalam istilah *pembangunan*. Hal inilah yang menjadi cikal bakal untuk menumbuhkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan yang baru.

Dalam konotasi yang lain, penamaan Orde Baru dimaksudkan untuk mengidentifikasi dirinya sendiri, baik secara moral maupun politik berbeda dengan rezim-rezim sebelumnya. Jika dalam periode 1950-1959 panggung politik Indonesia diramaikan oleh Demokrasi Parlementer, periode 1959-1965 oleh Demokrasi Terpimpin, maka dalam Orde Baru yang berlangsung dari tahun 1966 sampai 1998, Indonesia menganut Demokrasi Pancasila. Jika dalam priode 1950-1959, pembangunan ekonomi bersifat liberal dan disebut ekonomi liberal, sedangkan dalam priode 1959-1965 bersifat komando dan disebut Ekonomi Terpimpin, maka dalam era Orde Baru pembangunan ekonomi itu tidak jelas, sehingga dinamai ekonomi Pancasila. Kalau dalam periode 1950-1959, elit politik nasional didominir kelompok-kelompok PSI dan Masyumi, periode 1959-1965 oleh Soekarno dan PKI, maka dalam Orde Baru dominasi elit politik yang merupakan persekutuan segi tiga antara pemilik modal asing, kapitalis-birokrat dan Angkatan Bersenjata (Militer).

Jamie Mackie dan Andrew MacIntyre memberikan tiga tahap dan empat pemain inti dalam evolusi kekuasaan Orde Baru, yaitu militer, Soeharto, birokrasi dan para teknokrat. Selama periode 1965-1974, ABRI merupakan pusat struktur kekuasaan. Dalam periode ini Soeharto menjabat karena didukung oleh ABRI sedangkan birokrasi masih lemah. Dalam periode berikutnya (1974-1983), birokrasi

dan perusahaan negara menjadi lebih berkuasa, namun militer masih merupakan kekuatan yang menentukan. Titik rawan Presiden Soeharto muncul pada tahun 1975 dalam skandal minyak Pertamina. Sejak 1983 dan seterusnya, Soeharto berada pada puncak kekuasaannya. Kekuasaan ABRI berkurang sedangkan pengaruh birokrasi dan para teknokrat meningkat.⁸ Namun demikian, penggolongan empat pemain kunci ini lebih diperumit oleh kenyataan bahwa golongan-golongan ini tidak disket (terpisah-pisah) sifatnya. Misalnya, banyak purnawirawan menempati posisi dalam birokrasi, bidang usaha serta partai Golkar – mesin politik pemerintah.

Selama periode awal Orde Baru, melalui Dwi Fungsi ABRI, kedudukan TNI-AD tidak pernah menjadi alat mati pemerintah atau suatu alat penjaga keamanan belaka sebagaimana yang tertera dalam “Landasan Idiil”. Sebagai pejuang kemerdekaan, dokumen itu menekankan, TNI-AD tidak dapat berdiri netral terhadap baik buruknya pemerintah, keselamatan negara dan masyarakat Pancasila. “TNI-AD tidak hanya mempunyai tugas pokok teknis kemiliteran belaka, melainkan juga disegala bidang kehidupan”.⁹ Dengan demikian dapat dipahami Soeharto banyak menempatkan perwira-perwira militer di dalam kabinetnya, juga dalam institusi politik serta ekonomi yang strategis. Posisi kunci dalam kabinet sepanjang kekuasaannya, seperti menteri sekertaris negara, menteri dalam negeri, dan menteri pertahanan dan keamanan senantiasa dipegang oleh para perwira militer. Bahkan,

⁸ Jamie Mackie dan Andrew MacIntyre, “Politics”, dalam Hal Hill (peny.), *Indonesia’s New Order the Dynamics of Socio-Ekonomi Transformation* (St. Leonards: Allen & Unwin, 1994), h. 1-53 dalam Kathrine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam*, Syarikat, Yogyakarta, 2008, h. 65

⁹ Salim Said, *Tumbuh dan Tumbuhnya Dwifungsi*, Aksara Karunia, Jakarta, 2002, h. 71.

perwira-perwira tinggi militer juga tampil dalam posisi eselon atas birokrasi sipil dan sekretaris umum, khususnya dalam kementerian yang dijabat sipil. Dalam pemerintahan regional, beberapa perwira tinggi ditunjuk sebagai gubernur, dan pada tingkat yang lebih rendah, para kolonel ditunjuk sebagai bupati. Pada tahun 1982 saja, menurut catatan TEMPO (20 Maret 1982) anggota ABRI yang “dikaryakan” sudah sekitar 13 ribu orang dari 350 ribu orang, atau sekitar 3,7 persen. Dalam kabinet saat itu, tercatat 12 orang menteri dan ABRI, beberapa orang masih berstatus aktif. Di antara jabatan Gubernur, tidak kurang dari 21 yang berasal dari ABRI.

Pos pejabat tinggi juga dipegang oleh militer, antara lain sekjen (sekertaris jenderal) sebanyak 11 orang, dirjen (direktur jenderal) sebanyak 25 orang, serta irjen (instruktur jenderal) sebanyak enam orang. Di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), selain duduk di Fraksi ABRI sebanyak 75 orang, juga ada sekitar 15 orang (pada umumnya sudah purnawirawan) yang duduk di dalam Fraksi Karya Pembangunan, sekitar 25 orang dari ABRI menduduki pos duta besar. Di samping itu, para perwira militer juga memegang posisi penting di beberapa perusahaan negara seperti Pertamina, P.N. Timah dan Bulog. Bahkan Ketua Mahkamah Agung (MA) pun dijabat oleh seorang perwira militer, serta 100 orang perwira diangkat menjadi anggota DPR. Singkatnya militer menyeruak mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, bahkan juga pada puncak lembaga yudikatif. Bahkan pelbagai institusi politik sipil sekedar replikasi dari organisasi militer.

Dominasi militer ini terus dipertahankan rezim Orde Baru melalui represi dan kontrol politik yang ketat. Enin Supriyanto mengatakan negara (state) Orde Baru hadir secara masif, komprehensif, dan represif dalam semua sektor kehidupan masyarakat yang menyebabkan terbentuk dan terpeliharanya suatu jenis kebudayaan yang dapat disebut “kebudayaan represif” (*represif culture*). Jenis kebudayaan ini bersifat menindas dan memanipulasi makna kebudayaan, kecerdasan, dan kesadaran kritis masyarakat. Kebudayaan ini dibangun dan dipertahankan oleh rezim yang monolitik. Secara keseluruhan, negara Orde Baru adalah agen kebudayaan represif.¹⁰

Cara-cara represif bahkan sudah dimulai sejak awal rezim ini berkuasa. Dalam satu bulan kudeta para perwira serta orang-orang yang dicurigai ditangkap, dipindahkan, dan diberhentikan dengan tidak hormat. Lebih lanjut Soeharto pun melalui kuasanya menunjuk orang-orang yang dipercayanya untuk mengisi posisi kunci staf umum Angkatan Darat, dan mengeluarkan Nasution dari pusat penentuan kebijakan. Bahkan para anggota PKI dan simpatisan mengalami pembunuhan massal yang jumlahnya mencapai setengah juta, sebagian lagi dipenjarakan, atau mengalami pengasingan politik. Represi politik tidak hanya ditujukan pada partai eks-PKI, tetapi juga pada sisa-sisa para “Soekarnoisme” yakni pendukung partai PNI (Partai Nasional Indonesia), PSI (Partai Sosialis Indonesia) serta kelompok-kelompok oposisi. Terhadap kelompok oposisi, represi secara sistematis dilakukan melalui penyederhanaan partai politik setelah pemilu 1971. Fusi parpol menjadi hanya tiga

¹⁰ Enin Supriyanto. *Menolak Merunduk: Menentang budaya represif*, 1999, Grasindo, Jakarta. hal xxvi

partai, yaitu partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Golongan Karya merupakan partai hegemonik yang menguasai di DPR dan MPR.

Selain itu diciptakan pula sistem yang bercorak korporatis dengan mengoptasi massa ke dalam wadah tunggal yang mudah dikontrol. Sebentuk pendisorganisasian *civil society*. Saluran suara rakyat yang semula di implementasikan melalui organisasi partai politik, ormas dan lembaga politik lainnya di depolitisasi menjadi alat kontrol korporatis negara atas rakyat. Mekanisme perwakilan kelompok-kelompok *civil society* tersebut dibentuk oleh negara dan disetujui oleh negara dalam rangka memperlemah organisasi independen. Implikasinya gerakan oposisi tidak pernah menjadi ancaman, dan massa dalam sebuah organisasi tidak memiliki organisasi yang efektif dan basis yang jelas. Ialah Ali Moertopo, seorang jenderal yang menciptakan sebuah sistem kontrol korporatis yang ketat atas kekuatan-kekuatan *civil society*.¹¹ Kontrol yang efektif ini merupakan bagian dari keinginan untuk mempertahankan kekuasaan, yang secara teoritis dapat menggunakan aparat represi negara, yakni militer dan polisi, atau penanaman ideologi¹². Karena tindakan represi selalu berarti

¹¹ Sistem control korporatis ini dicirikan oleh suatu sistem partai politik yang disederhanakan dan dapat dengan mudah dimanipulasi di bawah dominasi partai negara, Golkar, serta mekanisme 'perwakilan' kelompok-kelompok *civil society* melalui organisasi-organisasi yang didirikan dan disetujui negara, dalam rangka memperlemah organisasi independen. Sebagai contoh, organisasi buruh independen selama beberapa dekade sebelumnya telah dihambat pertumbuhannya dengan didirikannya FBSI (Fedrasi Buruh Seluruh Indonesia) di tahun 1973, yang kemudian dikenal sebagai FSPI (Fedrasi Sarekat Pekerja Seluruh Indonesia). Penjelasan lebih lanjut dapat dilihat di Salim Said, *Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi*, Aksara Karunia, Jakarta, 2002, h. 80

¹² Arbi Sanit, Mahasiswa, *Kekuasaan dan Bangsa, refleksi dan Gagasan Alternatif*, Lingkar Studi Indonesia dan yayasan LBH Indonesia, 1989, h. x

penggunaan kekuatan fisik secara langsung untuk pengamanan dan pelanggaran dominasi kekuasaan, sedangkan penanaman ideologi merupakan upaya untuk membangun legitimasi kekuasaan yang berbentuk pengakuan hak memerintah dari suatu rezim.

Rezim Orde baru juga digambarkan sebagai rezim otoriter, karena pengendaliannya yang ketat terhadap media dan pendidikan, memanipulasi pemilihan umum, kurangnya kebebasan berpendapat, dan tradisi menggunakan militer untuk menangani apa yang disebut “ancaman terhadap keamanan nasional” atau perlawanan terhadap rezim. Secara ideologis istilah rezim juga sesuai dengan definisi “otoriter” karena rezim ini bersikeras untuk menjaga persatuan antara negara dan masyarakat. David Boucheir berpendapat bahwa dasar ideologi rezim ini dapat digambarkan sebagai sesuatu yang bersifat organis dan integralis yang “memandang dan masyarakat sebagai kesatuan organik yang sama, dan berlambang keluarga atau komunitas desa yang harmonis”.¹³

Dengan demikian Orde Baru melalui Pancasila, menggambarkan hubungan negara dan masyarakat sebagai sebuah hubungan yang mirip keluarga, dimana negara memainkan peran sebagai ayah yang baik hati dan bijaksana. Dalam wacana tersebut, militer Indonesia mendudukan dirinya sebagai penjaga keluarga dan model peran

¹³ David Bourcheir, “Lineages of Organicist Political Institutions”, Pacific Affair 58, no. 1 (Spring 1985): 72. Robert Lowry, *The Armed Forces of Indonesia* (St. Leonards: Allen & Unwin, 1996), h. 71. Donald K. Emmerson, “Understanding the New Order: Bureaucratic Pluralism in Indonesia”, *Asian Survey* 23, no. 11 (November 1983): 1224. Dalam Kathrine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam*, Syarikat, Yogyakarta, 2008, h. 6.

bagi masyarakat. Atas dasar itu timbul pemujaaan terhadap keselarasan yang melampaui segala hal, serta pengutukan segala bentuk konflik sebagai sesuatu yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa. Oleh karena itu partai-partai politik maupun organisasi massa diharapkan bekerja sama dalam mencapai tujuan pembangunan nasional yang dikomandoi negara. Namun dengan di resmikannya Pancasila sebagai azaz tunggal pada tahun 1985, berakibat pada penyangkalan terhadap gagasan tentang politik oposisi yang sah.

Lebih lanjut konflik dan hal-hal yang dinilai mengganggu legitimasi kekuasaan Orde Baru, akan dengan mudah dituduh mengganggu stabilitas nasional, tidak sesuai dengan kepribadian bangsa, atau tidak Pancasila. Bagi rezim Orde Baru, stabilitas nasional menjadi tiang pancang penting jalannya pemerintahan. Suatu contoh kebijakan *floating-mass*, yang bermaksud menjamin stabilitas untuk kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Ironisnya kebijakan ini telah mematikan aspek partisipasi masyarakat luas dan melegitimasi dominasi peranan negara.

Konsep stabilitas nasional tidak lagi merujuk pada pengertian adanya dinamika dalam kesimbangan sebagai mana yang terus di wacanakan rezim Orde Baru, melainkan merujuk pada pengertian gerak statis. Konsepsi stabilitas nasional ini lebih merupakan konsep yang diturunkan untuk menjamin kelangsungan pembangunan ekonomi, yang pada dasarnya sangat diperlukan legitimasi bagi kekuasaannya. Konsep ini bisa ditegakkan melalui berbagai *Reformasi Konstitusional*

yang mengakibatkan tertutupnya peluang *partisipasi politik* dan diganti dengan tekanan yang sangat kuat bagi terbentuknya *tertib-politik*.

Dalam praktik, konsepsi ini sangat besar peranannya sebagai alat antikritik, khususnya jika muncul kritik-kritik yang menyinggung keberlangsungan mekanisme kekuasaan. Di pihak lain, sebagai pelengkap, dimunculkanlah konsepsi *kepribadian nasional* yang senilai dengan konsepsi kebudayaan nasional. Pancasila sebagai falsafah bangsa, dan menjadi konsep yang memiliki kekuatan normatif. Sebab, konsepsi kepribadian *identitas kebangsaan*, maupun bermakna ontologis, berkenaan dengan *kesatuan/ keutuhan bangsa*. Namun Pancasila yang sama-sama disepakati sebagai falsafah bangsa, telah diturunkan derajatnya oleh rezim Orde Baru, sekedar sebagai alat untuk memperoleh legitimasi kekuasaan.¹⁴

Menurut Michael Morfit, seperti pernah disitir oleh Van Langenberg, yang sangat penting dari ideologi ketertiban adalah peranan ABRI sebagai pengawal Pancasila. Sejak awal kekuasaan Orde Baru, gagasan Dwifungsi ABRI telah digunakan oleh oligarki yang memerintah di dalam sistem negara untuk mengembangkan aparatus militer yang tersentral dan liar dalam hal politik.¹⁵ Studi Jeffrey A. Winters, *Oligarchy* (2011), mengategorikan Orde Baru sebagai rezim oligarki yang menyerupai bentuk kesultanan. Dalam seluruh praktek politiknya, Soeharto dengan Orde Barunya secara sempurna menjalankan model pemerintahan

¹⁴ Samuel P. Huntington, dalam *Political Order In Chaging Society*, New York, Yale University Press, 1970. Dalam Enin Supriyanto, *Menolak Merunduk Menentang Budaya Represif*, Grasindo, Jakarta, 1999, h. 34.

¹⁵ Budi Irawanto, *op. cit*, h. 19

oligarki-kesultanan (*sultanistic oligarchy*), yakni model oligarki dengan seluruh alat koersi berada di satu tangan sosok oligarkis (penguasa tunggal) dari pada suatu pelembagaan yang dibatasi oleh hukum dan aturan. Model oligarki ini biasanya ditopang oleh norma hubungan patronase (*patronclien*).¹⁶

Dalam sistem oligarki kesultanan, para oligarkis lainnya tidak memiliki akses terhadap kekerasan atau senjata yang dimiliki negara, karena instrumen kekerasan sepenuhnya berada di tangan si penguasa tunggal dan bercampur aduk dengan alat koersi pribadi milik si penguasa tunggal. Jadi instrumen dan alat kekerasan negara diperlakukan sebagai milik pribadinya. Oligarki Soeharto dengan Orde Baru-nya menguasai jaringan bisnis dan ekonomi skala besar melalui usaha anak-anaknya. Untuk mengamankan usaha dan jaringan bisnisnya, Orde Baru menerapkan rezim pengendali, yang memakan korban HAM skala luas, sebagaimana yang terjadi di tahun 1965-1971, demikian juga di Aceh, Papua, Timor-Timur, Lampung, dan wilayah-wilayah lainnya.¹⁷ Oligarki yang melekat pada otoritas Soeharto, pada akhirnya menggabungkan kekuasaan birokratis, militer, dan korporat melalui suatu jaringan patronase yang begitu luas, yang bermula dari istana hingga menyebar ke berbagai provinsi, kota, dan pelosok desa.

Zaman kolonialisme melalui pemerintahannya merupakan akar dari genealogi kekerasan di Indonesia pada masa sekarang. Namun kekerasan paling bengis yang

¹⁶ Konstelasi, *Orde Baru Merusak: Tapi Dirindu*, Analisis Berkala Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), No. 33 September 2011, h. 5.

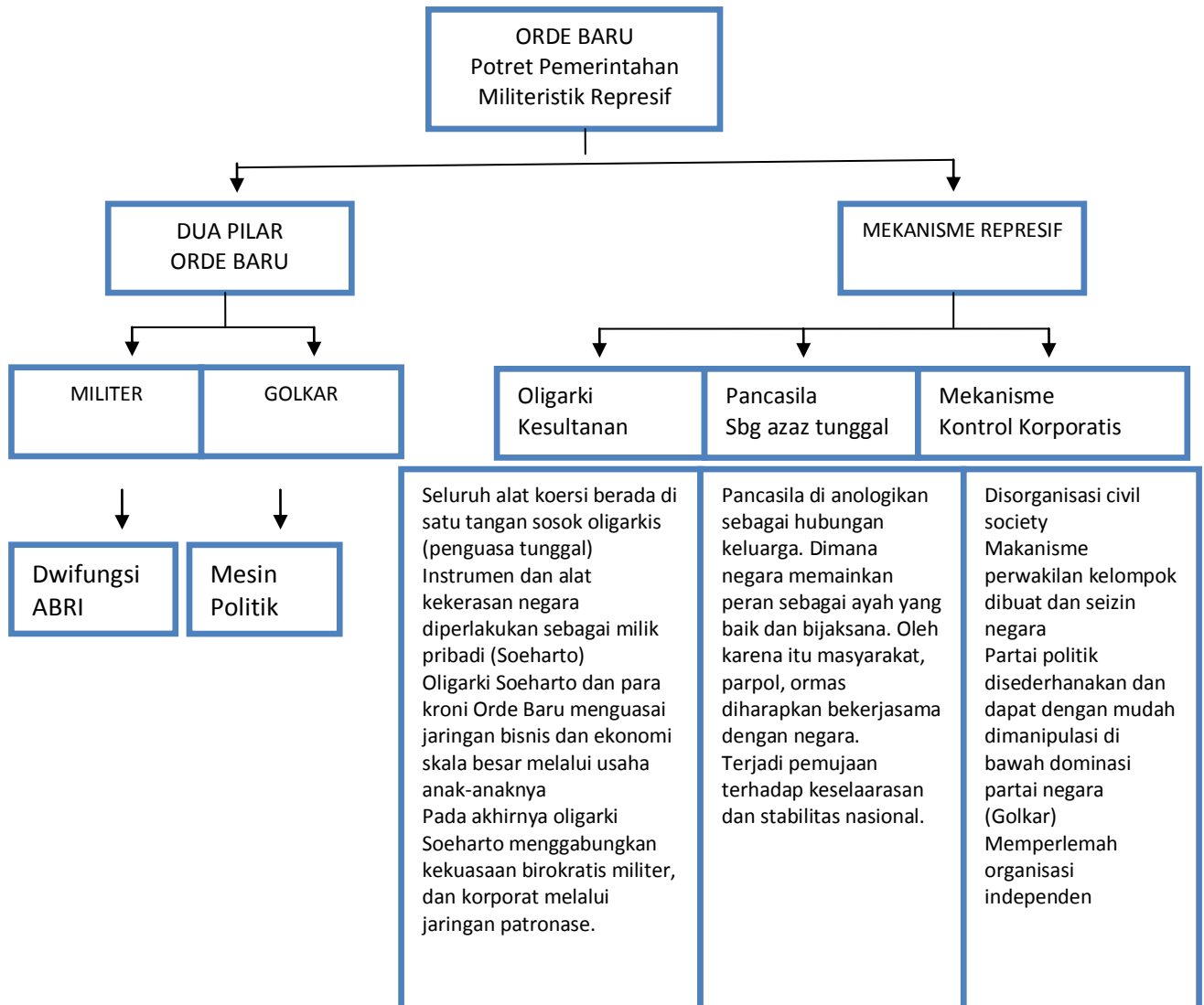
¹⁷ Konstelasi, *Orde Baru Merusak: Tapi Dirindu*, Analisis Berkala Perhimpunan Pendidikan Demokrasi (P2D), No. 33 September 2011, hal 5

dilakukan oleh negara setelah penjajahan ialah Orde Baru.¹⁸ Lahirnya Orde baru ditandai dengan peristiwa Gestapu, 30 September 1965. Dalam peristiwa ini ribuan bahkan jutaan orang yang teridentifikasi sebagai pengikut Partai Komunis Indonesia (PKI) menjadi korban. Sebagian dicabut hak kebebasannya, sebagian lagi masuk dalam jeruji besi hingga puluhan tahun, dan sebagian lagi dibunuh karena dianggap pengikut PKI atau aliran kiri, atau penganut marxisme atau anggota-anggota organisasi sosialis.

Di saat rezim ini berkuasa, peran militer berkembang tidak hanya melawan kekuatan asing, tetapi juga terhadap ancaman-ancaman dalam negeri. Melalui perangkat kekerasan yang legal yakni militer, negara melahirkan kembali praktek-praktek kekerasan dalam upaya menggulung kekuatan-kekuatan daerah yang dianggap melepaskan diri dari NKRI atau mengancam stabilitas politik dan keamanan nasional. Konsentrasi kekuatan bersenjata dilakukan negara dalam suatu proses yang disebut militerisasi. Militerisasi dapat diidentifikasi melalui indikator-indikator kualitatif seperti bertambahnya personel, teknologi persenjataan, anggaran, serta kapasitas kekerasan. Militerisasi ini dilegitimasi pemerintah melalui konsep Dwi Fungsi ABRI, sehingga ABRI tidak hanya bertugas menjaga negara dari kekuatan asing, namun berperan aktif dalam kehidupan sosial, politik, serta ekonomi.

¹⁸ Very J. Manik, *Reproduksi Kekerasan Tanpa Akhir Sebuah Pandangan Terhadap Ketidakmampuan Negara mengelola Kekerasan*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 3 No. 1 Juni 2003, h. 14.

Bagan 4.1 Mekanisme Tindak Represif Orde Baru



Dalam militerisasi terdapat perubahan budaya dalam nilai-nilai dan keyakinan pimpinan untuk mendukung kekerasan negara yang terorganisir. Adapun praktek kekerasan yang dilegalkan oleh negara diantaranya ialah peristiwa pembantaian, pemenjaraan, pencabutan hak kebebasan karena dianggap pengikut PKI, kiri,

penganut marxisme, ataupun anggota organisasi sosialis. Peristiwa itu dikenal dengan G30S/PKI, atau gerakan 30 September 1965. Selain itu kasus Aceh, Irian Jaya, Timor Timur, Lampung, penetapan keadaan darurat perang dalam waktu yang tidak terbatas terhadap masyarakat, aturan gelang karet, serta penetapan Petrus (penembak misterius) sekitar tahun 1980-an, merupakan segelintir peristiwa kekerasan yang terjadi pada masa pemerintahan Orde Baru. Kekerasan demi kekerasan ini menurut Daniel Dhakidae merupakan pendekatan sistem *military neo-fascism*, yaitu pengaturan legitimasi legal bagi peran militer yang luar biasa besar di hampir semua bidang. Melalui sistem neo-fasisme militer itu, pembangunan yang dikembangkan Orde Baru telah menciptakan *the economic apartheid* dengan ketimpangan alokasi sumber-sumber ekonomi dalam masyarakat.¹⁹

Lebih lanjut semakin timpang distribusi kekayaan secara regional dan sosial, maka semakin terbuka konflik-konflik dan kriminalitas di masyarakat, dan semakin timpang ekonomi, maka semakin menjadi politislah konflik-konflik yang kemudian merebak dalam bentuk aksi separatism. Semakin tinggi separatism maka semakin diperlukan kekuatan militer untuk melumpuhkannya. Jadilah militer yang kurang profesional dalam hal pengelolaan kekerasan (*the management of violence*), dimana kemampuan negara menggunakan kekuatan personil militer dengan pendidikan yang kurang memadai, disertai etika kemiliteran yang tidak tinggi, yang ternyata minim

¹⁹ Daniel Dhakidae. "Paradigma Baru Militer Indonesia", Kompas, 5 Juni 1999.hal 5

pula kemampuan menerapkannya.²⁰ Efek yang dihasilkan dari ketidakmampuan pengelolaan kekerasan ini adalah tindak kekerasan (*the act of violence*) semata, tanpa sebuah penyelesaian permasalahan. Negara Orde Baru tidak hanya melakukan praktek kekerasan, namun telah menanamkan kembali bom waktu kekerasan yang siap meledak saatnya.

Ignas Kleden dalam artikelnya di sebuah media masa menunjukkan tiga tipologi kekerasan yang terjadi semasa Orde Baru. Pertama kekerasan fisik, kedua kekerasan struktural, dan terakhir kekerasan kultural. Kekerasan fisik merupakan penggunaan kekuatan fisik berupa ancaman senjata, teror, intimidasi, penculikan atau pemenjaraan (penahanan paksa) untuk memaksakan kehendak penguasa dan menekan serta membatasi kehendak pihak lain. Walaupun secara legal terdapat pembenaran dari kekerasan jenis ini dengan dalih keamanan negara maupun serangan balik terhadap pihak-pihak membahayakan negara, akan tetapi acapkali penafsiran tentang keadaan yang “membahayakan negara” atau “subversive” itu tidak pernah jelas batasan dan substansinya.

Kedua kekerasan struktural atau dominasi. Kekerasan jenis ini terwujud dalam keadaan seimbang kekuatan-kekuatan sosial (*uniquel exchange of social force*), baik dalam bidang ekonomi maupun dalam bidang politik. Wujud paling keras dari ketidakseimbangan ekonomi terlihat dari praktek-praktek monopoli dan monopsoni. Sedangkan wujud paling keras dari ketidakseimbangan politik sangat mencolok

²⁰ Opcit.hal 5

terlihat antara negara dan masyarakat, ABRI dan sipil. Struktur yang demikian telah membuat sebuah kelompok unggul dan sering bertindak merugikan kelompok yang lemah.

Ketiga, kekerasan kultural atau hegemoni. Kekerasan model ini terwujud akibat ketidakseimbangan dalam tukar-menukar makna (*unequal exchange of meaning*). Pihak yang satu memproduksi makna dan pihak yang lain hanya menjadi konsumen tanpa dapat memberikan penolakan secara nyata. Hegemoni adalah makna yang diterima bukan karena bobot kebenarannya, melainkan lebih karena kekuasaan dan kewibawaan yang mendukungnya.²¹

4.2.2 Penetrasi Negara Birokratik Militer di Dunia Mahasiswa

Semula kelahiran Orde Baru membawa angin segar untuk perubahan tatanan kehidupan politik, ideologi, ekonomi dan sosial kebudayaan. Orde Baru mendapat simpati dan empati dari komunitas muda, termasuk mahasiswa. Sedangkan mahasiswa yang berhimpun dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa (KAMI) menempatkan posisinya sebagai *partnership* militer.²² Bahkan dalam beberapa tulisan Arif Budiman dikemukakan bahwa gerakan mahasiswa tahun 1966 bisa berhasil berkat dukungan kuat militer di belakangnya.²³ Akan tetapi hubungan harmonis tersebut tidak bertahan lama. Titik-titik kontradiksi mulai mencuat kepermukaan. Di awal tujuh puluhan,

²¹ Ignas Kleden, *Kekerasan Orde Baru dan Setahun Mei Kelabu*, Kompas, 13 Mei 1999.

²³ Arif Budiman dalam Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan; Gerakan Mahasiswa antara Aksi Moral dan Politik*. Pustaka Pelajar, Jakarta, 1999. h. xi

mahasiswa secara kritis mengecam rezim Orde Baru yang dirasa mangkir dari komitmen kelahirannya, bahkan cenderung membuka katup bagi elit-elit dalam lingkaran kekuasaan untuk melakukan korupsi. Di lain pihak menguatnya peran militer dalam kehidupan sosial, politik, serta ekonomi mengakibatkan disintegrasi antara mahasiswa dengan militer.

Disintegrasi yang terjadi antara militer mahasiswa dan pemerintah terjadi hampir sepanjang tahun 1970-an, yakni ketika gerakan antikorupsi, anti proyek TMII, dan tuntutan akan hak-hak sipil mulai marak. Apalagi setelah munculnya isu golput pada tahun 1977 yang terus bergulir hingga Pemilu 1997 dan peristiwa Malari (Malapetaka 15 Januari 1974), gerakan dan aksi mahasiswa praktis dianggap sebagai determinan instabilitas yang layak diwaspadai. Kerenggangan itu terus berlanjut yang ditandai oleh alotnya proses tawar menawar soal perizinan kegiatan mahasiswa dan munculnya tudingan aparat bahwa gerakan dan aksi mahasiswa tergolong organisasi tanpa bentuk (OTB).²⁴

Sikap kritis mahasiswa yang salah satunya dituangkan dalam gerakan mahasiswa dinilai membahayakan penguasa. Penguasa dalam hal ini pemerintah melalui militer secara sistematis mulai melakukan pembenahan dan kontrol yang efektif terhadap mahasiswa, seperti meredam tuntutan mahasiswa dengan memenjarakan para pemimpin mahasiswa. Hariman Siregar, dan Aini Chalid

²⁴Abdurrahman Wahid, dkk, *Berpolitik atau Kembali Ke Barat; Militer dalam Wacana Masyarakat Madani*, BIGRAF Publishing, Yogyakarta, 1999, h. 158.

merupakan sedikit dari sekian banyak mahasiswa yang diadili oleh pemerintah sebagai subversif²⁵. Sikap paling keras yang ditunjukkan mahasiswa 1978 ialah menuntut Presiden Soeharto mundur dari jabatannya, segera dijawab dengan menurunkan militer untuk menduduki kampus-kampus, seperti ITB dan UI. Para pemimpin mahasiswa juga ditangkap dan kemudian diadili. Lebih jauh lagi, pemerintah membekukan DM (Dewan Mahasiswa) se-Indonesia. Sementara sejumlah surat kabar dan majalah dibredel²⁶.

Upaya tersebut ternyata tidak cukup, pengebirian mencapai klimaksnya ketika Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Dr. Daoed Jusoef membuat kebijakan Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK)²⁷. NKK/ BKK dituangkan dalam Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0156/ U/ 1978. Dalam surat keputusan itu antara lain disebutkan, “Menugaskan kepada para pimpinan perguruan tinggi untuk melakukan Normalisasi Kehidupan Kampus dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan petunjuk yang telah digariskan dalam Raker Rektor se-Indonesia.” Raker tersebut diselenggarakan pada tanggal 14 febuari 1978, dimana ketika itu Presiden Soeharto minilai bahwa sekelompok mahasiswa dan oknum-oknum tertentu telah menyalahgunakan kebebasan mimbar secara tidak bertanggung jawab sehingga perlu diadakan

²⁵ Enin Supriyanto, *Menolak merunduk: Menentang Budaya Represif*, 1999, Grasindo, Jakarta. Hal. xiii

²⁶ *Ibid.*, h. xiii

²⁷ NKK/ BKKK juga merupakan produk kebijakan yang memiliki kohesi dengan doktrin nilai-nilai 1945 versi militer. NKK/ BKK juga merupakan sumbangsih Brgadir Jendral Nugroho Notosusanto yang dirancang untuk membatasi kegiatan politik mahasiswa, agar tidak perah terlibat lagi untuk melawan atau menggulingkan pemerintahan.

penertiban. Tujuannya agar kampus kembali kepada fungsi sejati, sebagai tempat yang memiliki fungsi sebagai pembangunan bangsa. Untuk itu presiden meminta agar dipahami tindakan aparat keamanan menangkapi sejumlah pimpinan mahasiswa.²⁸

NKK/ BKK dibuat sebagai usaha untuk menetralsir kegiatan politik mahasiswa. Tidak hanya itu muncul ketetapan lain yang semakin memperlemah posisi mahasiswa. Dalam Rapat Kerja Rektor (Raker) se-Indonesia pada tanggal 17Februari 1978, dibahas masalah kebebasan mimbar akademis. Disebutkan bahwa kebebasan mimbar akademis akan tetap dimiliki oleh mahasiswa sebatas hak mahasiswa memilih mata kuliah yang disenanginya. Kertas kerja itu menempatkan mahasiswa hanya sebagai penerima ilmu pengetahuan. Mahasiswa tidak dimasukkan sebagai pencari ilmu pengetahuan. Dalam posisi ini mahasiswa tidak dapat mengadu argumentasi dan memiliki pemikiran sendiri, akibatnya diskusi-diskusi mahasiswa yang berkaitan dengan masalah-masalah politik berkurang.²⁹

Selanjutnya penjabaran lengkap dari kebijakan NKK itu dituangkan dalam keputusan Direktur Jendral Pendidikan Tinggi Departemen Kebudayaan. Salah satu instruksinya ialah pelaksanaan penataan kembali lembaga-lembaga kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Instruksi inilah yang kemudian melahirkan struktur organisasi mahasiswa baru bernama Senat Mahasiswa, menggantikan organisasi Dewan Mahasiswa yang telah dibekukan. Kontrol dilakukan sedemikian ketat terhadap Senat

²⁸ Edy Budiyarso, *op. cit.* 234.

²⁹ Edy Budiyarso, *op. cit.*, h. 235

Mahasiswa. Terdapat campur tangan pimpinan fakultas dan tingkat institut atau universitas dengan adanya Badan Koordinasi Kemahasiswaan (BKK) yang diketuai oleh Pimpinan Kampus lewat Pembantu Rektor III bidang Kemahasiswaan. Semua lembaga birokrasi kemahasiswaan bertanggung jawab kepada rektor. Campur tangan birokrasi kampus secara langsung kepada mahasiswa dilembagakan melalui dosen pembimbing. Di struktur Senat Mahasiswa, semua petanggung jawaban mahasiswa tidak kepada mahasiswa seperti halnya di Dewan Mahasiswa, melainkan pimpinan perguruan tinggi.³⁰ Secara singkat BKK yang terkooptasi oleh birokrasi kampus berbeda dengan Dewan Mahasiswa yang independen.

Penerapan kebijakan NKK /BKK menimbulkan aksi protes mahasiswa di sejumlah kampus. Tidak hanya mahasiswa yang melakukan kritik, Rektor IKIP Jakarta Prof. dr. Winarno Surachmad menyatakan bahwa Normalisasi Kehidupan Kampus jangan hanya dilihat seakan-akan mahasiswa yang sakit, lalu mahasiswa disembuhkan. Menurut Winarno mahasiswa hanyalah bagian dari fenomena keseluruhan.

“Normalisasi juga mungkin menyangkut para dosennya, normalisasi pimpinannya, normalisasi cara kerja universitasnya dan normalisasi kedudukan dewan dan senat mahasiswa. Bahkan, mungkin lebih jauh daripada itu juga normalisasi hubungan antara organisasi mahasiswa, intra, dan ekstra mungkin juga hubungan mahasiswa dengan ABRI, mahasiswa dengan rakyat.”³¹

³⁰ *Ibid.*, h. 241.

³¹ Pelita edisi 22 April 1978, dalam Edy Budiaryso, *Menentang Tirani, Aksi Mahasiswa 1977/ 1978*, Grasindo, Jakarta, 2000, h. 243.

Dalam pelaksanaan NKK/ BKK, terdapat sanksi yang berat atas pelanggaran kebijakan NKK/ BKK. Pemecatan dan pengucilan dari dunia pendidikan tidak segan dilakukan bagi yang melanggar, entah mahasiswa, dosen atau rektor sekalipun. Pemecatan mahasiswa pernah terjadi pada mahasiswa UI. Petter Sumarwoto dan Biner Tobing, dua mahasiswa yang mengaku dirinya sebagai pemimpin Dewan Mahasiswa (DM) UI. Mereka tidak mau mengakui pembekuan DM oleh Pangkopkamtip, sekaligus tidak mengakui kebijakan NKK/ BKK³². Hal serupapun terjadi pada aktivis ITB. Aktivis ITB berusaha mempertahankan lembaga DM lewat pelaksanaan pemilihan ketua DM secara langsung pada tahun 1981, tetapi mereka terpaksa harus menghadapi tindakan pemecatan dari pihak rektorat³³.

Perlakuan represif yang diterima mahasiswa melalui birokrasi kampus, berdampak pada timbulnya ketakutan di kalangan mahasiswa jika mereka bersikap kritis. Akibat yang muncul adalah matinya inisiatif mahasiswa untuk menyampaikan gagasan kritis. Selain itu mahasiswa juga harus menghadapi tekanan yang demikian besar dari luar. Inilah yang disebut Enin Supriyanto³⁴ sebagai faktor yang mengakhiri *student government* di tingkat universitas. Mahasiswa kian merosot moralnya untuk tampil dalam aktivitas politik sebagai “oposisi”. Mahasiswa kehilangan daya untuk mengorganisasikan diri kembali dalam arena *student government*.

³³ Enin Supriyanto, *op. cit.* h. xiii

³⁴ Enin Supriyanto adalah aktivis mahasiswa tahun 90-an.

Tidak hanya karena faktor NKK/ BKK yang membuat mahasiswa tidak lagi bersikap kritis. Ada kebijakan lain yang mempengaruhi aktivitas kemahasiswaan, antara lain dengan diberlakukannya sistem Satuan Kredit Semester (SKS). Sistem SKS secara tidak langsung menggiring mahasiswa untuk berkonsentrasi kepada studi. Mekanisme Indeks Prestasi (IP) dan pembatasan masa studi di perguruan tinggi membuat mahasiswa harus lebih serius dan cepat menyelesaikan masa studinya. Dalam situasi tersebut, mulai pertengahan 1980-an mahasiswa memilih aktif di luar kampus, berkelompok secara eksklusif dalam bentuk-bentuk kelompok studi/ diskusi.³⁵

Hal ini seperti yang dikatakan oleh Ichlasul Amal:

“Melarikan diri kepada kelompok studi merupakan jalan yang paing aman dalam menghadapi kondisi serba represif. Dan karenanya kepentingan mahasiswa lebih banyak diarahkan pada pemikiran dari pada aksi yang mengarah kepada politik praktis dalam rangka mengubah struktur kekuasaan. Gerakan mahasiswa lebih menekankan penyadaran subjektif melalui aksi-aksi informasi. Dan ini merupakan cara optimal yang bisa dilakukan oleh para mahasiswa.”³⁶

Pada akhirnya, NKK/ BKK merupakan sebuah produk pemerintah yang membatasi suara-suara kritis mahasiswa, mematikan kreatifitas dan kesadaran kritis mahasiswa. Organisasi mahasiswa hanya berurusan dengan masalah-masalah internal kemahasiswaan, sehingga aktifitas mahasiswa dapat dianalogikan seperti menara gading. Eksklusif, karena tidak bersinggungan secara langsung dengan kepentingan

³⁵ Menentang merunduk xiv

³⁶ Ichlasul Amal., Latar Belakang Sosial Ekonomi, Indeks Prestasi dan Arah Pemahaman Ekonomi-Politik Mahasiswa Peserta Kelompok-Kelompok Aktivitas Non-Kurikuler (Penelitian), (Yogyakarta: Fisipol UGM, 1987) dalam Arbi Sanit, Mahasiswa, Kekuasaan dan Bangsa, refleksi dan Gagasan Alternatif, Lingkar Studi Indonesia dan yayasan LBH Indonesia, 1989 hal 247

masyarakat. Konsekuensinya dukungan masyarakat kepada aktivitas mahasiswa semakin menurun.

Kemudian berbagai tindakan represif serta munculnya kekerasan negara melalui aparat militer selama Orde Baru terhadap sejumlah aksi mahasiswa, berlangsung hingga munculnya reformasi dan Sidang Istimewa MPR. Berbeda dengan gerakan 1966, saat itu mahasiswa secara heroik harus menghadapi militer sendirian. Hanya rakyat Jakarta dari kampung-kampung disekitar tempat demonstrasi yang mendukung mereka. Juga ketika mereka diserang oleh kelompok militer Pam Swakarsa yang organisasinya mendapatkan persetujuan dari Jendral Wiranto.³⁷ Hal ini merupakan indikasi nyata bahwa relasi harmonis antara mahasiswa dan militer telah hancur. Kuatnya tuntutan pencabutan fungsi ganda (Dwifungsi) ABRI, serta penghapusan kebijakan NKK/ BKK oleh mahasiswa dan masyarakat luas semakin mengukuhkan dugaan terjadinya *missing link* relasi tersebut.

4.2.3 Penetrasi Negara Birokratik Militer di Mapala X

Secara historis sinisme terhadap aparat militer di dunia mahasiswa semakin bertumbuh, namun tidak dengan mahasiswa Mapala X. Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Mapala X memiliki kohesi yang kuat dengan militer. Sejak tahun-tahun awal relasi yang terjalin antara Mapala X dengan militer terjalin harmonis. Mapala X kerap menggunakan medan-medan tentara/ Kopasus. Mereka juga dilatih

³⁷ Arif Budiman dalam Arbi Sanit, *Pergolakan Melawan Kekuasaan; Gerakan Mahasiswa antara Aksi Moral dan Politik*. Pustaka Pelajar, Jakarta, 1999. h. xii

oleh aparat militer, serta beberapa kali pernah terlibat dalam pendakian bersama dengan militer. Jika dikaitkan dengan Dwifungsi ABRI, fenomena ini menunjukkan bahwa militer telah berhasil menjalankan fungsi sosial politiknya, setidaknya militer berhasil mempengaruhi mahasiswa di Mapala X.

Dalam Doktrin Tri Ubaya Cakti yang dirumuskan kembali oleh Soeharto, terdapat Doktrin pembinaan yang mengatur pembentukan kekuatan, kesiapan dan ketahanan di bidang ideologi, agama, sosial-budaya, dan sosial militer. Melalui doktrin ini dapat dimengerti berbagai tindakan militer keranah sipil, termasuk Mapala X merupakan implementasi dari doktrin tersebut. Bahkan di bidang pendidikan, sejalan dengan ide-ide seminar 1972 mengusulkan warga negara termasuk mahasiswa maupun anggota Angkatan Bersenjata harus diindoktrinasi mengenai nilai-nilai 1945 versi militer, termasuk nilai disiplin dan secara tersirat nilai dedikasi kepada negara. Nugroho Notosusanto bahkan berpegangan pada ide bahwa militerlah yang berperan menanamkan disiplin dalam “generasi muda” Indonesia untuk menjamin pembangunan yang berkelanjutan. Dalam pidatonya, ia mengemukakan:

Sejak jaman Orde Baru pendidikan tidak pernah dianggap semata-mata sebagai sesuatu kegiatan rutin, melainkan dipersepsikan sebagai pembentukan kader penerus perjuangan bangsa maupun kader penerus pembangunan nasional sebagai pengalaman Pancasila.³⁸

³⁸ Nugroho Notosusanto. “Regenerasi dan Motivasi”, pidato untuk *Hari Pendidikan Nasional*, 2 Mei 1985, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.

Pada tahun 1996, Romo Mangunwijaya, seorang pastor yang terkenal dan aktivis hak asasi manusia menunjukkan bahwa beberapa ciri-ciri sistem sekolah seperti baris-bebaris, penerapan disiplin dan bahasa gaya militer serta sistem menghafal fakta-fakta adalah tanda bahwa sekolah bukan lagi sekolah melainkan organisasi untuk “kaderisasi”. Jika ditilik pendapat Romo Mangunwijaya sejalan dengan visi yang dikemukakan Nugroho. Nugroho adalah seorang militer, dan semenjak tahun 1964 ia dianugrahi jabatan Kepala Pusat Sejarah ABRI. Ia juga mengajar di Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia. Pengangkatan Nugroho sebagai tenaga pengajar dan Kepala Pusat Sejarah ABRI di tahun-tahun pertama rezim tidak menjadi masalah di kampus, karena pada saat itu mahasiswa pada umumnya memandang militer sebagai pahlawan.

Mahasiswa yang anti-komunis merasakan bersekutu dengan militer, karena militer dengan hati-hati merayu mereka.³⁹ Namun demikian, setelah rezim Orde Baru mengkonsolidasikan dirinya dan ciri-ciri otoriternya tampak semakin jelas, sentimen mahasiswa berubah menjadi anti-militer. Bahkan ketika Nugroho diangkat sebagai Rektor Universitas Indonesia pada tahun 1982, terjadi aksi penolakan oleh mahasiswa, kecuali mahasiswa anggota Mapala X. Nugroho adalah satu dari sekian banyak militer yang diangkat oleh pemerintah dan ditempatkan di kampus untuk membatasi kebebasan kehidupan mahasiswa, termasuk universitas Mapala X bernaung. Sumbangan Nugroho sebagai Rektor ialah kebijakan NKK/ BKK yang

³⁹ Soe Hok Gie, *Catatan Seorang Demonstran* (Jakarta: LP3ES, 1983), h. 187, 191.

dirancang untuk membatasi kegiatan politik mahasiswa. Ia juga memperkenalkan konsep “transpolitiasasi, profesionalisasi dan institusionalisasi” dalam kaitannya dengan pengelolaan universitas, dengan tujuan bahwa universitas tidak pernah akan terlibat lagi dengan kegiatan melawan atau menggulingkan pemerintah.⁴⁰

Orde Baru yang sarat kekerasanpun akhirnya tumbang. Kerusuhan Mei 1998, merupakan peristiwa yang berhasil menumbangkan rezim yang telah berkuasa hingga tiga puluh dua tahun lamanya. Ketika itu mahasiswa dari sejumlah almamater bergabung, turun kejalan, menuntut lengsernya Soeharto dari kursi pemerintahan. Meski berganti rezim, namun praktek-praktek kekerasan tereproduksi kembali dan tidak lagi tunggal di tangan negara, seperti halnya yang terjadi di Mapala X. Saat ini kita masih dengan mudah menemukan reproduksi kekerasan yang tiada henti, baik di masyarakat, lingkungan pendidikan, bahkan di kalangan militer, polisi, maupun di kalangan organisasi mahasiswa pecinta alam.

4.3 Praktik Militeristik di Mapala X; Dampak Politik Pencitraan Militer

Ketika rezim militeristik yang dikomandoi Soeharto tumbang, pada tahun 2004 dalam suatu pemilihan umum yang demokratis, rakyat Indonesia memilih seorang purnawirawan; Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Fenomena ini menarik, mengingat enam tahun lalu rakyat Indonesia bersatu padu menumbangkan rezim militeristik. Sementara dalam konteks penelitian penulis, sejak berpuluh-puluh tahun lamanya Mapala X menggunakan praktik militeristik dalam pendidikannya.

⁴⁰ Bujono, “*Perginya Seorang Bapak Asuh*”, Tempo, No. 15, 1985, h. 14-5

Praktik militeristik dianggap sebagai model yang tepat guna membentuk fisik dan mentalitas yang kuat. Walaupun ada keinginan untuk mengakhiri militerisme zaman Orde Baru, di sebagian kalangan masyarakat Indonesia sudah tertanam persepsi bahwa militer merupakan pemimpin bangsa dan *roll* model terbaik.

Sementara, jika kita membaca sejarah Indonesia, seperti sebuah kaleidoskop tentang menguatnya kekuasaan militer. Kekuatan militer dibahasakan secara heroik melalui buku-buku sejarah, monumen, diorama, museum, bahkan film yang kerap diputar di sekolah-sekolah dasar. Hampir-hampir bentuk perjuangan merebut kemerdekaan, didominasi perlawanan bersenjata yang dilakukan militer. Sehingga berbicara mengenai sejarah perjuangan bangsa, juga membicarakan sepak terjang militer sebagai garda terdepan perjuangan bangsa. Apakah realitas ini adalah sesuatu kenyataan yang obyektif? atau ada kekuatan besar yang mengontruksi? Sehingga meskipun Indonesia pernah dihegemoni oleh rezim yang militeristik represif tidak mengubah masyarakat Indonesia untuk menggunakan cara-cara militer, atau memilihnya kembali sebagai pemimpin bangsa?

Seorang pemimpin dari negeri yang dulu dijuluki sebagai tirai besi, Khrouchtchev mengakui bahwa sejarahwan adalah “satu-satu kelompok yang bisa mempertanyakan legitimasi penguasa”⁴¹ Bagaimana kekuasaan dilegitimasi, dipertahankan hingga mempengaruhi kehidupan masyarakat membutuhkan saksi-

⁴¹ Aswi warman Adam, *Dalam Panggung Sejarah*. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2011 hal 567

saksi sejarah serta narasi-narasi sejarahnya. Berbicara mengenai sejarah, penulis menyitir kritik Barry Schwartz terhadap Maurice Halbwachs. Maurice mengatakan bahwa sejarah merupakan ingatan kolektif, namun Barry menjelaskan sejarah tidak cukup dikatakan sebagai ingatan kolektif, karena “dalam peristiwa sejarah tidak terdapat objektivitas, dan tidak ada peristiwa dalam sejarah yang dapat meniadakan pengaruh faktor-faktor khusus masa kini”.⁴² Barry Schwartz mengusulkan mengkaji bagaimana masa lalu digambarkan, berdasarkan pemikiran bahwa “masa lalu tidak dapat dikonstruksikan secara harfiah, tetapi dapat dimanfaatkan secara efektif.”⁴³ Mengikuti Barry, dalam sub bab ini penulis memusatkan perhatian kepada pemanfaatan sejarah oleh pemerintah. Bagaimana mereka mengonstruksi sejarah dan menggunakannya hingga terjawab pertanyaan di atas.

Sedikit mundur kebelakang, suatu catatan yang penting untuk menggambarkan bahwa sejarah tidak bebas nilai adalah peristiwa konferensi sejarah pertama di Indonesia, yang diselenggarakan pada tahun 1957 di Universitas Gajah Mada Yogyakarta. Di sana dibahas apakah sejarah harus digunakan untuk menciptakan dan mendukung nasionalisme, atau sejarah dilindungi dari tuntutan-tuntutan nasionalisme dan justru digunakan untuk meningkatkan “pendalaman yang umum terhadap pemahaman sosial”. Banyak yang memilih untuk mendukung nasionalisme sebagai upaya mengkonsolidasi rasa kebangsaan, namun banyak juga

⁴² Schwartz, “*The Soocial Context of Commemoration*”,h.376 dalam sejarah berseragam hal 20

⁴³ Asvi Warman Adam, “*Pengendalian Sejarah Sejak Orde Baru*”, dalam Sejarah berseragam hal 21

yang kehilangan gairah terhadap nasionalisme dan sejarah nasionalis.⁴⁴ Ahli Sejarah Soedjatmiko melihat adanya bahaya dalam penekanan yang berlebihan pada sejarah yang nasionalis, namun karena berbagai alasan termasuk barunya Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara, serta perlunya menempa suatu identitas nasional, historiografi yang nasionalis tetap menjadi prioritas.

Sejak bangsa ini merdeka, sejarawan dan semua tokoh masyarakat berada di bawah tekanan penguasa. Di masa pemerintahan Soekarno sejarawan dituntut untuk mengacu pada ideologi Manifesto Politik Presiden Soekarno (Manipol-Usdek).⁴⁵ Di masa Soeharto para ahli sejarah profesional seperti Taufik Abdullah, Sartono Kartodirdjo, Onghokham, dan Anhar Gonggong dibuat frustrasi oleh pembatasan-pembatasan yang dikenakan pada kajian sejarah selama Orde Baru.

Di masa Orde Baru ahli-ahli sejarah resmi diuntut untuk memproyeksikan rezim dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta menyajikan

⁴⁴ Pasalnya nasionalisme dalam pengertian paling umum merujuk pada cinta individu kepada bangsa dan negaranya, namun nasionalisme dengan drajat yang ekstrim seperti Nazi Jerman dan Jepang juga melahirkan penindasan terhadap bangsa lain. Di Jepang sebelum perang Dunia II, pendidikan semakin menjadi alat untuk menyampaikan ideologi ultranasionalis dan militeris. Sebagaimana dengan Indonesia, sejak awal masa Jepang modern negarawan Jepang menyokong gagasan untuk menggunakan pendidikan dan sejarah sebagai alat untuk menyampaikan nasionalisme. Sesudah perang Dunia II, Menteri dalam Negeri Shidehara Kijuro menunjuk ke “sistem pendidikan yang sesat sebagai akar penyebab perang karena formalisme ultra-patriotik yang imperialis”. Sedangkan Nazi Jerman dengan nasionalisme romantiknya mengagungkan bahwa bangsanya diberkahi “ruh” mistis dan misterius yang membuat bangsanya lebih unggul dari pada lainnya. Rezim inipun merupakan salah satu rezim paling berutil dan berdarah sepanjang sejarah. Di ambil dari berbagai sumber; Harun Yahya, *Ancaman di Balik Romantisme*, Dzikra, Bandung, 2002, h. 11 terj. Tim Penerjemah Hikmah dan Kathrine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam*, Syarikat, Yogyakarta, 2008, h.70

⁴⁵ Manipol-Usdek merujuk pada Manifesto Politik, nama yang diberikan untuk Pidato Sukarno pada Peringatan Kemerdekaan tahun 1959. Selanjutnya Manipol diskematisasikan ke dalam lima gagasan utama (yang disingkat sebagai “Usdek”). Kelima gagasan itu adalah UUD '45, Sosioalisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, ekonomi Terpimpin, dan Jatu Diri Bangsa. Lebih lanjut lihat Kathrine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam*, Syarikat, Yogyakarta, 2008, h.47.

pembenaran atas peran militer dalam politik. Pada saat itu pemerintah hanya mengesahkan tafsiran-tafsiran yang hegemonis dan yang dikendalikan dengan ketat tentang beberapa bagian masa lalu Indonesia. Pemerintah juga menciptakan halangan-halangan untuk mencegah adanya penelitian terhadap topik-topik yang peka, seperti topik periode Demokrasi Terpimpin, dan periode peralihan 1965-1968. Bahan-bahan seperti surat kabar masa peralihan 1965-1967 dikeluarkan dari perpustakaan umum. Kemudian ahli sejarah dan mahasiswa perlu mendapat surat izin dari badan intelijen seperti Bakorstanas (Badan Koordinasi Pemantapan Stabilitas Nasional) dan Bakin (Badan Koordinasi Intelijen Negara) dan Kepala Perpustakaan Nasional untuk dapat menggunakan bahan yang dilarang untuk umum.⁴⁶ Sementara sejumlah buku-buku di luar versi pemerintah dilarang beredar, seperti buku kenangan Oei Tjoe Tat berjudul *Memoar Oei Tjoe Tat, Pembantu Presiden Soekarno*, sebuah buku yang menyajikan suatu pandangan yang lain mengenai politik di periode Demokrasi Terpimpin dan peralihannya ke periode Orde Baru.

Pengendalian sejarah memang tergantung pada “dapur” tempat sejarah itu diolah: siapa sejarahwannya, di lembaga mana ia bekerja. Makin independen lembaga/ pribadi yang menulis, makin otonom hasil karyanya. Kalau dapur sejarah itu partai seperti di bekas Uni Soviet, sejarah adalah urusan negara. Semua diawasi ketat karena sejarawan adalah “orang-orang berbahaya”. Jika dapurnya institusi militer, yang ditekankan adalah stabilitas dan keamanan negara; kalau perguruan

⁴⁶ Redaktur, “Mengapa Dilarang?”, Media Kerja Budaya, No. 3, Februari 1996, h.9.

tinggi dan lembaga penelitian, orientasinya bisa lebih lapang⁴⁷. Sementara dalam konteks Indonesia, Orde Baru atau rezim sebelumnya mendasari diri mereka dengan dasar berpikir dan perspektif yang sama dalam membangun historiografi Indonesia. Dua-duanya membangun ingatan masa lalu Indonesia dengan membenturkan secara langsung dua elemen ideologis untuk melegitimasi kuasa politik dominan masing-masing rezim. Jika rezim sebelumnya membangun sejarah Indonesia sebagai dari pembenturan antara kolonialisme dan imperialisme melawan nasionalisme Indonesia dengan Soekarno sebagai pusat, maka Orde Baru melihat sejarah Indonesia sebagai hasil dari perjuangan antara pendukung dan penentang Pancasila dengan menempatkan militer sebagai faktor penentu.⁴⁸

Terpilihnya Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden di pemilu 2004, serta tumbuhnya berbagai organisasi sipil berwajah militeristik seperti di Mapala X merupakan buah keberhasilan yang ditaman militer selama priode Orde Baru (1966-1998), terutama dengan caranya mengontruksi masa lampau. Selama tiga puluh dua tahun lamanya, militer sebagai sebuah institusi dan ideologinya telah berhasil membangun citra baik untuk melegitimasi dirinya sendiri maupun kekuasaan yang didukungnya melalui (salah satunya) historiografi yang dikonstruksi secara tunggal dan seragam. Proses konstruksi nalar pikir masyarakat melalui persepsi-persepsi kesejarahan dituangkan melalui berbagai medium; narasi sejarah, film, museum,

⁴⁷ Aswi warman Adam, dalam *Panggung Sejarah. Pusat Penelitian dan Pengembangan Arkeologi Nasional*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta 2011, h.566

⁴⁸ Bambang Purwanto dalam Kathrine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam*, Syarikat, Yogyakarta, 2008, h. xxiii.

diorama, monumen serta hari-hari peringatan nasional. Politik pencitraan skala masif ini menciptakan perspektif yang menganggap militer salah satu *roll* model terbaik, serta wajar dan pantas menjadi pemimpin bangsa.

Buku pelajaran sejarah serta berbagai narasi kesejarahan merupakan bagian inti dari terciptanya pengertian bersama mengenai identitas. Bagi rezim otoritarian, buku teks sejarah merupakan alat yang berguna untuk melegitimasi ideologi negara dan mekanisme otoritarian. Bagi rezim yang dimiliterisasi seperti Orde Baru, sejumlah teks sejarah merupakan alat mempromosikan perlunya peran politik militer. Salah satu instruksi yang diberikan Seminar Angkatan Darat 1972 kepada militer ialah agar mereka mengedarkan versi mereka sendiri kepada masyarakat Indonesia melalui sarana-sarana yang digunakan seperti memoar, film, museum, monumen dan kurikulum sejarah di sekolah dan militer, media serta kegiatan-kegiatan peringatan. Yang menjadi sasaran proyek-proyek ini ialah generasi muda agar mereka menghargai apa yang telah dilakukan oleh Generasi 1945, serta menerima dominasi militer di seluruh sektor kehidupan. Dalam proyek-proyek sejarah ini, militer berfokus pada memajukan peran mereka sebagai pahlawan, dan pemimpin perjuangan kemerdekaan 1945-1949, dan mempromosikan nilai-nilai militeristik pada umumnya. Letnan Jendral M.M. Rachmat Kartakusuma, Kepala Staf Pertahanan dan Keamanan, mengungkapkan:

Bagaimana kita dapat membina mental prajurit, mengantarnya kedalam tradisi suci baik kesatuannya dan Angkatan maupun pada seluruh ABRI tanpa mempergunakan sejarah? Dan bagaimana kita dapat memberikan pengertian kepada masyarakat luas terutama generasi muda yang tidak mengalami perjuangan 1945 [penekanan saya], mengenai hakikat dwifungsi

ABRI, jika kita tidak menyampaikannya kepada khalayak itu sejarah lahirnya ABRI dari kandungan perjuangan nasional itu sendiri? Mereka pasti akan mengira bahwa ABRI sama saja dengan angkatan bersenjata di negara-negara lain, sehingga kekaryaan ABRI ditafsirkan militerisme, karena peranan ABRI yang begitu menonjol⁴⁹.

Adalah Nugroho Notosusanto aktor yang memberikan banyak sumbangsih terhadap konstruksi pencitraan militer di masyarakat. Nugroho selain menjabat sebagai Brigadir Jendral Angkatan Darat, ia juga menjadi orang kepercayaan Soeharto, serta arsitek sejarah Orde Baru. Iapun pernah menjadi penjuang perang kemerdekaan di tahun 1945-1949, dan melalui pengalamannya ini menjadikan ia pengaggum berat nilai-nilai militer. Di tahun 1964, Nugroho secara tidak resmi diangkat oleh Soeharto sebagai Kepala Pusat Sejarah ABRI, dan pada tahun 1985 ia berkedudukan sebagai Menteri Pendidikan. Dalam rentang waktu tersebut hingga akhir hayatnya, Nurgroho bekerja tanpa lelah untuk memajukan dan membela militer Indonesia serta peran politik mereka melalui sejumlah besar proyek-proyek bersejarah.⁵⁰

Untuk mengetahui cara kerja Orde Baru mengonstruksi sejarah bangsa hingga mempengaruhi masyarakat dengan memeriksa sarana-sarana yang digunakan. Beberapa rekomendasi yang dihasilkan oleh seminar 1972 untuk menanamkan nilai-nilai 1945 adalah memelihara makan pahlawan, melestarikan tempat-tempat bersejarah yang berkaitan dengan perjuangan kemerdekaan, dan mendirikan

⁴⁹ Dikutip dari Departemen Pertahanan Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Sepuluh Tahun Pusat Sejarah ABRI, Departemen Pertahanan-Keamanan Pusat Sejarah ABRI, Jakarta, 1974, h. 46. Kathrine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam*, Syarikat, Yogyakarta, 2008, h.251

⁵⁰ *Ibid.*, h.4.

monumen-monumen revolusi. Pada tahun 1977, terdapat paling sedikit enam puluh monumen di Jawa yang memperingati peran Angkatan Darat dalam perjuangan. Nugroho juga mendukung gagasan untuk dibuatnya memoar sebagai sarana mewariskan nilai-nilai. Ia menganjurkan anggota Generasi 1945 menyusun memoar mereka sendiri.

Sejalan dengan tujuan semula yaitu “pewarisan nilai”, Susanto dan Supriatma berpendapat bahwa selama periode Orde Baru biografi-biografi ini berfungsi sebagai iklan dan alat legitimasi militer. Dengan menceritakan riwayat hidup para elite 1945, karya-karya ini terutama bertujuan mempromosikan dan membenarkan peran militer. Namun demikian, ada juga anggota militer dari Generasi 1945 yang sudah pensiun, memilih untuk mengkritik peran militer dalam politik. Dalam tahun 1980-an kritik-kritik ini mencapai puncaknya dan melahirkan Petisi 50. Adam Malik, mantan Wakil Presiden dan anggota kelompok Chairul Salleh-Sukarni yang menculik presiden Soekarno pada tahun 1945, juga menentang konsep militer bahwa seakan hanya militerlah yang memiliki hak eksklusif atas nilai-nilai 1945, dengan menunjukkan beragamnya Generasi 1945 itu.⁵¹

Rekomendasi lain yang diajukan oleh seminar 1972 ialah agar diupayakan untuk mengomunikasikan nilai-nilai 1945 kepada masyarakat yang lebih luas dalam bentuk media cetak dan audio. Peserta seminar menyarankan agar lebih banyak buku

⁵¹ Adam Malik, *In the Service of the Republic* (Singapore: Gunung Agung, 1980), h. 173-8 dalam Kathrine E. McGregor, *Ketika Sejarah Berseragam*, Syarikat, Yogyakarta, 2008, h.259.

dan bulletin tentang revolusi tersedia di perpustakaan sekolah dan aktif mengadakan lomba mengarang dengan menggunakan tema ini. Nugroho juga mendorong generasi muda untuk lebih banyak membaca sejarah dan cerita pendek tentang perjuangan.⁵² Dalam hal ini, Pusat Sejarah ABRI berupaya untuk menyediakan bagi generasi muda, khususnya bagi calon perwira, teks-teks sejarah yang mudah dibaca, seperti *Seri Bacaan untuk Prajurit*.

Peserta seminar Angkatan Darat 1972 juga berpendapat bahwa film harus menggambarkan tema-tema nilai-nilai 1945. Walaupun tema revolusi merupakan tema yang populer dalam film sejarah, selama periode Demokrasi Terpimpin, kesenian, sastra, film semakin dipolitisir. Krishna Sen mengamati pembuatan film sejarah mengalami kemandekan antara tahun 1965 dan 1972, disebabkan oleh suasana ketidakpastian sekitar periode transisi dan oleh kekhawatiran akan label “komunis” yang mungkin akan dilekatkan pada mereka. Setelah 1972, pembuatan film dilanjutkan kembali. Keadaan ini terkait, paling tidak, dengan arahan yang dihasilkan seminar 1972 yang menentukan topik dan pesan yang akan di filmkan. Beberapa film pasca 1972 adalah Mereka Kembali, 1975; Bandung Lautan Api, 1974; Janur Kuning, 1979; dan Serangan Fajar, 1983. Pendapat Budi Irawanto yang sejalan

dengan tujuan-tujuan seminar 1972 ialah bahwa film mengenai revolusi semakin menjadi medium untuk ideologi militer.⁵³

Seminar 1973 mengenai museum angkatan bersenjata merupakan tindak lanjut dari seminar 1972. Tujuan seminar adalah mendorong didirikannya lebih banyak museum militer. Dalam perkataannya, Nugroho menyatakan bahwa tujuan kajian sejarah ialah mengungkapkan identitas suatu kelompok sosial dan bahwa museum angkatan bersenjata memiliki alat untuk mencapai tujuan ini dalam bentuk visual. Nugroho melanjutkan bahwa dengan cara ini museum angkatan bersenjata dapat menjadi alat untuk memperkenalkan Angkatan Bersenjata kepada masyarakat. Nugroho merasa bahwa dengan membangun museum militer adalah cara menaikkan harga diri dan *esprit de corps* anggota militer dan warga negara, serta menambah pengetahuan rakyat mengenai peran ABRI di masa lalu.⁵⁴

Saran lain yang diberikan seminar 1972 ialah memasukan nilai-nilai 1945 sesuai dengan definsi militer ke dalam kurikulum militer maupun kurikulum pendidikan umum. Peserta seminar menyarankan agar kurikulum pra-sekolah memasukan juga lagu-lagu perjuangan dan kisah pahlawan. Sedangkan sekolah dasar memuat sejarah nasional, lagu perjuangan dan pendidikan kewarganegaraan. Kurikulum sekolah menengah harus mencakup sejarah nasional dan pengajaran

⁵³ Budi Irawanto, *Konstruksi Relasi Sipil-Militer dalam Sinema Indonesia Kajian Semiotik tentang Representasi Relasi Sipil-Militer dalam Film Enam Jam di Yogya, Janur Kuning dan Serangan Fajar*, Skripsi Fakultas FISIPOL, UGM, 1995, h. 153-8

⁵⁴ Nugroho Notosusanto, *Sejarah dan Hankam* (edisi kedua), Markas Besar Angkatan Bersenjata, Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1987, h. 18.

mengenai Dwifungsi, dan pada jenjang perguruan tinggi disarankan agar disajikan kajian yang komponen utamanya ialah nilai-nilai 1945, serta mata kuliah tentang pertahanan serta strategi nasional. Untuk masyarakat luas mereka juga menyarankan agar pendidikan mempromosikan integrasi militer dengan rakyat dan menyajikan mata pelajaran tentang kewiraan, masalah kemiliteran, dan ilmu militer di semua lembaga. Saran-saran ini bertujuan mempromosikan agar peran politik para militer diterima secara luas dan membuat masyarakat memahami pertahanan nasional. Simpulan ini sejalan dengan pendapat Kartakusuma pada tahun 1968, yang menyatakan bahwa agar generasi muda dapat memahami Dwifungsi, mereka harus diberi pelajaran sejarah angkatan bersenjata.

Banyak saran dalam seminar 1972 tentang cara mewariskan nilai-nilai 1945 melalui indoktrinasi dilaksanakan. Mata pelajaran Pendidikan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) diterapkan di berbagai tingkat pendidikan serta karyawan di bidang industri, pertanian, dan pemerintahan. Pelajaran tersebut meliputi pengajaran tentang tanggung jawab warga negara untuk berkorban bagi bangsa, negara dan Pancasila. Pelajaran ini juga memberikan garis besar kebijakan pertahanan nasional. Program kajian selanjutnya mengenai nilai-nilai kemiliteran yang dijadikan mata kuliah wajib di jenjang universitas adalah mata kuliah kewiraan yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan bersama dengan Lembaga Ketahanan Nasional. Selain bertujuan menanamkan semangat nasional, mata kuliah kewiraan juga mengajarkan doktrin-doktrin inti militer. Dengan demikian para siswa, mahasiswa serta masyarakat

diajarkan Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta-Hankamrata, sebuah konsep yang dikembangkan oleh Jendral Nasution selama revolusi yang merujuk peran semua rakyat Indonesia dalam ketahanan nasional, konsep wawasan nusantara, yang menekankan pada kesatuan geografis dan sosial Indonesia; serta masalah-masalah ideologi, politik, ekonomi.⁵⁵ Penataran indoktrinasi Pancasila, yang dilaksanakan sejak 1978 dan seterusnya dimaksudkan untuk menatar kaum terpelajar dan pegawai negeri, serta mempromosikan konsep peran rakyat dalam ketahanan nasional berdasarkan doktrin Hankamrata dan berdasarkan peran militer dalam pembangunan nasional.

Selanjutnya penanaman nilai disiplin dan patriotisme juga dicanangkan dalam Seminar 1972. Nilai-nilai ini sebelumnya sudah diperkenalkan melalui program pembangunan Sapta Usaha Tama (SUT) pada tahun 1960. Melalui program ini mendefinisikan nilai-nilai Generasi 1945 sebagai nilai disiplin, patriotisme, kesadaran sosial dan kreatifitas. Jadi, penekanan pada disiplin bukanlah ciri yang khusus dimiliki periode Orde Baru yang didominasi militer. Hanya saja Orde Baru kemudian menggalakan kembali. Pusat Sejarah ABRI juga mampu mempromosikan nilai-nilai 1945 versi militer dalam narasi sejarah Indonesia, karena perannya dalam menetapkan kurikulum sejarah sekolah sejak 1970 sampai seterusnya. Pada tahun 1974, Menteri Pendidikan mengangkat Nugroho dan anggota staf yang lain sebagai kepala tim riset untuk buku sejarah bagi sekolah menengah. Staf Pusat Sejarah ABRI

⁵⁵ AAGN Ari Dwipayana, *op. cit.*, h. 60

juga membantu menyiapkan buku teks sejarah untuk sekolah menengah pertama dan menengah atas dari tahun 1975-1976, dan untuk pendidikan tinggi dari tahun 1970-1974. Pusat Sejarah ABRI juga berperan serta dalam evaluasi buku-buku perpustakaan sekolah.

Buku sejarah nasional versi militer kerap mendapat kritik tajam. Burhannudin Mohammad Diah, seorang tokoh pers dan seorang dari sejumlah pemuda yang pada tahun 1945 mendesak Soekarno untuk memproklamkan kemerdekaan. Dalam sebuah artikel yang diterbitkan oleh harian *Merdeka* pada tanggal 8 April 1976, ia memberikan kritik tajam serta menghimbau Nugroho dan penulis-penulis lain agar menulis surat pengunduran diri kepada Menteri Pendidikan.⁵⁶ Ketika Nugroho menempati kedudukan sebagai Menteri Pendidikan, ia mengambil langkah-langkah khusus untuk mewujudkan tujuan-tujuan Seminar 1972. Pertama dia menugasi staf Pusat Sejarah ABRI untuk merumuskan mata pelajaran Pendidikan Moral Pancasila, sebuah komponen ideologis yang penting dan langgeng dari sistem pendidikan yang menyertai mata tataran P4. Dia juga merancang sebuah mata pelajaran sejarah yang baru, Pendidikan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB).

⁵⁶ Diah mempermasalahkan penggambaran di Volume Lima. Pertama bahwa pemimpin nasionalis Indonesia pada akhir masa gerakan sebagai orang-orang yang putus asa dan sebagai orang-orang yang tidak percaya diri. Diah berpendapat bahwa penulis seharusnya lebih spesifik menyebutkan kelompok nasionalis mana yang bersedia bekerja sama dengan Belanda. Diah juga mengkritik para penulis dalam menggambarkan periode kepemimpinan Soekarno sebagai langkah mundur bangsa, hanya karena mereka tidak setuju dengan tindakan-tindakan Soekarno. Dia berpendapat bahwa para penulis tidak bisa membedakan fakta dari nilai, kenyataan dari interpretasi, serta masih banyak lagi kritik yang diberikan Diah terhadap narasi sejarah Indonesia. Dia menekankan betapa pentingnya karya tersebut sebagai sejarah yang standar dan besarnya tanggung jawab yang dipikul para penulisnya, mengingat buku tersebut akan digunakan untuk pelajaran sejarah di sekolah. Lebih lanjut baca Koran Merdeka, 8 April 1976

Tujuan PSPM adalah memperluas dan mengembankan jiwa, semangat dan nilai-nilai 1945 untuk generasi muda.

Penulisan sejarah nasional yang baik dan ideal adalah yang memuat semua golongan dan aspirasi banyak kalangan masyarakat. ini artinya tidak menulis satu golongan saja... tapi jika menulis hanya militer atau politik saja, ini bukan sejarah bangsa. Itu namanya sejarah militer atau sejarah politik.⁵⁷

Proyek *Sejarah Nasional Indonesia* juga mendapat kritik tajam dari ahli sejarah Indonesia dalam konteks keresahan yang ditimbulkan salah satunya melalui narasi PSPB. Pada tahun 1985, tidak lama setelah Nugroho meninggal meletuslah polemik yang baru mengenai mata pelajaran PSPB dan buku *Sejarah Nasional Indonesia*. Pada tanggal 9 September, Lembaga Penelitian sejarah Nasional di Universitas 17 Agustus menyelenggarakan seminar untuk membahas masalah-masalah ini. Kepala Lembaga, Dr Soerto menyarankan agar Garis Besar Haluan Negara mengenai PSPB diubah supaya kekacauan yang terjadi dalam pelajaran sejarah di sekolah-sekolah tidak menjadi lebih parah. Peserta seminar juga menyimpulkan bahwa *Sejarah Nasional Indonesia* mencoba menghancurkan nama baik Soekarno. Soerto mempertanyakan mengapa bangsa Indonesia melalui penuturan narasi sejarah menghina dan melecehkan pemimpin nasional mereka sendiri. Peserta seminar menyarankan agar buku tersebut ditarik kembali dan dilarang dipakai di sekolah.

....kurang murni...artinya sejarah, apalagi sejarah untuk pendidikan generasi muda, seharusnya tidak dibebani pesan-pesan atau tambahan-tambahan yang menyallahi

⁵⁷ Harsya W. Bachtiar, "Buku Sejarah Nas Tak akan Dimusnahkan", *Pelita*, 17 September 1985

pengertiannya. Sejarah harus murni. Kalau ingin memasukkan unsur-unsur yang bertujuan menjatuhkan lawan politik atau memojokkan golongan tertentu, bukan sejarah lagi namanya. Ini juga akan sangat berbahaya bagi generasi muda kita.⁵⁸

Pengendalian narasi sejarah oleh militer berkat peran ganda mereka yang dirumuskan dalam Dwifungsi ABRI. Jauh sebelum Dwifungsi ABRI di sahkan, militer khususnya Angkatan Darat memang telah memiliki kedudukan istimewa dalam bidang politik nasional sejak pertengahan tahun 1950-an dan seterusnya, dan karena itu mereka merupakan salah satu kekuatan yang paling signifikan dalam sejarah Indonesia baru. Pemberlakuan hukum militer dalam keadaan darurat antara 1957 dan 1963 memperbesar wewenang militer atas pemerintahan lokal. Kemudian setelah upaya kudeta 1965 yang memicu terjadinya pengambilalihan kekuasaan oleh militer, Dwifungsi ABRI disahkan, serta sejumlah personel militer dipindah ke posisi kunci pemerintahan. Setahun setelah peristiwa kudeta, dalam suatu seminar Angkatan Darat yang kedua, Angkatan Darat mulai mendudukan dirinya sebagai pemegang peran kunci dalam pembinaan watak dan bangsa.

Melalui Dwifungsi ABRI, militer mendominasi hampir disetiap lini kehidupan masyarakat, dan salah satu akibatnya adalah proyek-proyek Pusat Sejarah ABRI tidak hanya ditujukan kepada tentara. Masyarakat sipil juga diharapkan taat pada versi yang dibesar-besarkan mengenai peran militer dalam sejarah. Peran militer ini khususnya tercantum dalam buku teks *Sejarah Nasional Indonesia* yang

⁵⁸ “Akan Ada Perbaikan dan Buku PSPB Baru Sudah Dipersiapkan”, *Sinar Harapan*, 11 September 1985.

penyusunannya menjadi bagian tanggung jawab Nugroho Notosusanto. Melalui sejumlah proyek sejarah militer, TNI menggunakan tafsirnya sendiri mengenai peran-peran sejarah, khususnya selama masa rezim Orde Baru, untuk memotivasi calon perwira, meningkatkan persatuan militer secara internal, memperkuat legitimasi kedudukan mereka, dan menciptakan perasaan selalu adanya musuh dalam masyarakat Indonesia yang perlu diwaspadai.⁵⁹

Salah satu perbandingan yang paling menonjol dengan Orde baru adalah Jepang sebelum Perang Dunia II. Pendidikan dan sejumlah teks sejarah menjadi alat untuk menyampaikan ideologi ultranasionalis dan militeris. Di tahun 1890, Kaisar Jepang mengeluarkan “Tanggapan Kekaisaran mengenai Pendidikan” untuk menentukan garis batas antara semangat Jepang (*kokutai*) dengan ilmu pengetahuan barat (*wakonyosai*). Sebagaimana dengan Indonesia, sejak awal masa Jepang modern negarawan Jepang menyokong gagasan untuk menggunakan pendidikan dan sejarah sebagai alat menyampaikan nasionalisme. Tujuannya ialah untuk membuat orang merasa dirinya bangsa Jepang dengan menentukan nilai-nilai nasional tertentu seperti kesetiaan kepada Kaisar, kepatuhan kepada negara dan undang-undang, serta kepedulian terhadap kebaikan bersama. Paul Brooker menggambarkannya sebagai “dimensi etika sosial dari nasionalisasi Jepang”, dan sebagai satu dari dua tiang penyangga persaudaraan dalam negara, dan tiang penyangga lainnya adalah Shinto –

⁵⁹ Kathrine E. McGregor., *op, cit.*, h.7.

agama resmi negara.⁶⁰ Dengan demikian para elit Jepang berusaha untuk menyebarkan gagasan ikatan kekeluargaan yang kekal di antara para warga negaranya. David Boucheir mengamati adanya kesejajaran di sini dengan fungsi Pancasila dalam Orde Baru Indonesia.⁶¹ Jepang semakin dimiliterisasi, khususnya setelah keluarnya Undang-undang Pemeliharaan Perdamaian 1925 yang bertujuan menghambat berkembangnya sosialisme di Jepang, dan penekanan nasionalisme pun meningkat. Sejak 1937 dan seterusnya, semangat perang mendapat penekanan dalam buku pelajaran guru mengenai etika. Semangat perang ini digambarkan sebagai ciri khas moralitas Jepang, yaitu “cara menghayati kesetiaan”. Sebagaimana yang terjadi dalam kasus Orde Baru Indonesia, Jepang sebelum Perang Dunia Kedua juga menggunakan sejarah sebagai alat untuk menyampaikan kepada warganegara nilai-nilai yang sudah ditentukan. Dalam dua kasus ini, juga digunakan pendekatan yang otoriter terhadap pendidikan berada dalam tangan negara, dan bukan di tangan rakyat.⁶²

Kesejajaran yang antara Jepang sebelum Perang Dunia Kedua dan Orde Baru di Indonesia adalah digunakannya Tanggapan Kekaisaran dan Pancasila masing-masing untuk mengatur nilai-nilai yang harus diikuti oleh warga negara. Mata pelajaran dan mata kuliah Pendidikan Moral Pancasila mulai diselenggarakan di

⁶⁰ Paul Brooker, *The Faces of Fraternalism: Nazi Germany, Fascist Italy, and Imperial Japan* (Oxford [England]: Clarendon Press; New York: Oxford University Press, 1991) Dalam Kathrine E. McGregor, *op. cit.*, h. 68.

⁶¹ Bouchier, “*Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia*”, h. 164, 239. Dalam Kathrine E. McGregor, *op. cit.*, h. 65.

⁶² Hario, *Educational Thought and Ideology in Modern Japan*, h. 17. Dalam Kathrine E. McGregor, *op. cit.*, h. 69

perguruan-perguruan tinggi negeri pada awal tahun 1970-an. Sejak 1978, indoktrinasi Pancasila meluas dan mencakup semua pegawai negeri. Pelajaran-pelajaran ini sebagian besar bertujuan untuk mengaitkan Orde Baru dengan Pancasila, untuk menciptakan ikatan antara rakyat dan rezim. Dalam pelajaran-pelajaran ini tekanan diberikan kepada konsep-konsep kepemimpinan, keselarasan dan kepatuhan individu dan kelompok.⁶³

Nilai-nilai lain yang diagung-agungkan dan dimajukan oleh rezim Orde Baru ialah nilai-nilai 1945 yang lebih militeristik. Pentingnya bagi militer Indonesia untuk meneruskan nilai-nilai ke masyarakat yang lebih luas memang sejalan dengan tugas pembinaan watak yang oleh militer Indonesia dianugerahkan kepada dirinya sendiri. Cara untuk menyebarkan nilai-nilai tersebut ialah melalui penekanan pada sejarah dan mulai dilaksanakan setelah Seminar Angkatan Darat pada tahun 1972 yang membahas perlunya penyampaian nilai-nilai antar generasi Indonesia. Hal ini merupakan konsolidasi misi Indonesia untuk menggunakan sejarah demi manfaat yang bisa diperoleh, sebuah misi yang berlangsung cukup lama. Ari Dwipayana dkk, berpendapat bahwa indoktrinasi nilai-nilai, ideologi, dan model organisasi militer kepada masyarakat melalui sekolah, tempat kerja, perkumpulan dan lewat media memegang peran dalam membela dominasi militer di Indonesia.

⁶³ Bouchier, "Lineages of Organicist Political Thought in Indonesia", h. 229-36. Kathrine E. McGregor, *op. cit.*, h.70

Sebagaimana di Jepang, adanya tantangan militer asing mengakibatkan penekanan yang kuat pada tema-tema perang yang patriotik dalam buku pelajaran yang diproduksi oleh rezim Uni Soviet dan Korea Selatan. Hal ini berbeda dengan Orde Baru di Indonesia yang tema-tema perangnya yang patriotik dalam sejarah yang dibuat oleh negara berasal dari penekanan yang terus menerus pada kebutuhan untuk membela negara terhadap ancaman-ancaman internal dan ideologis, dan bukan karena adanya musuh dari luar. Sebagian konfrontasi militer Indonesia sesudah perang kemerdekaan dilakukan terhadap musuh dalam negeri dan bukan musuh dari luar, dan karena itu upaya-upaya militer difokuskan pada penumpasan musuh negara. Kekhawatiran pada musuh dalam negeri ini lazim dijumpai pada militer yang dipolitikan, yang dengan demikian juga mempengaruhi ideologi rezim-rezim yang didominasi oleh militer seperti di Birma.

Jatuhnya Soeharto pada tahun 1998 membawa angin segar bagi historiografi Indonesia. Banyak sejarawan Indonesia, para aktivis, serta wartawan dengan tradisi literernya menantang konstruksi sejarah nasional versi Orde Baru, atau secara halus mereka menawarkan versi-versi alternatif tentang sejarah Indonesia. Jika dahulu mereka di bungkam, dan karya-karyanya dilarang beredar, sebagaimana yang dialami oleh Pramudia Ananta Toer. Kini kita dapat dengan mudah menjumpainya di rak-rak buku perpustakaan, toko buku, maupun café-café yang menjajakan sejumlah buku-buku di etalasenya. Dari sini penulis mengkrucutkan argumentasi, bahwa fenomena

pendidikan militeristik di Mapala X juga memiliki kohesi dengan bangunan konstruksi sejarah yang direproduksi oleh penguasa.

Sejarah merupakan memori sosial, dan sejumlah dokumentasinya merupakan alat melawan lupa. Membaca narasi sejarah seperti berada dalam lorong waktu yang menghantarkan kita ke masa lalu, dan dalam taraf tertentu memungkinkan kita untuk menganalisis serta menorong masa depan. Soekarno secara dramatis menggaungkan arti penting sejarah sebelum lengser dari kursi pemerintahan. Ia mengatakan; jangan sekali-sekali melupakan sejarah, atau biasa disingkat dengan jasmerah. Bagi Soekarno pentingnya penggunaan sejarah dalam rangka pembentukan identitas bangsa. Namun sejarah berpuluh-puluh tahun lamanya telah menjadi alat politik penguasa.

Welmoed Koekebakker memberikan empat alasan mengapa hal tersebut terjadi. Pertama, tidak ada pembagian yang jelas antara tugas politik dan militer: perjuangan kemerdekaan dimotivasi secara politik. Ketika pemimpin sipil Indonesia dipenjara oleh Belanda pada bulan Desember 1948, kepemimpinan revolusi secara *de facto* dilakukan oleh militer. Tentaralah yang memerintah di wilayah-wilayah yang semula dikontrol oleh kaum nasionalis. Kedua, terdapat ketegangan-ketegangan di antara para pemimpin sipil dan militer sejak awal. Banyak pemimpin militer tidak menghargai diplomasi sebagai pilihan yang dapat berjalan. Konsensi-konsensi yang dibuat Soekarno dan Hatta selama negosiasi telah menciptakan ketidakpercayaan yang permanen. Ketiga, jarak sosial di antara sebagian besar elit perwira dan

penduduk pedesaan menjelaskan kurangnya keterlibatan dalam pengembangan sebuah tatanan politik dan sosial yang baru. Keempat, perang kolonial – lembar hitam dalam sejarah Belanda modern – memberikan penjelasan historis bagi popularitas angkatan bersenjata sampai sekarang.

4.4 Praktik Militeristik dan Implikasi Kekerasan di Mapala X

Berbicara praktik militeristik di Diklatsar Mapala X mengingatkan penulis pada tradisi pendidikan militeristik Sparta. Jauh sebelum Mapala X berdiri, dan beribu-ribu mil jauhnya Sparta telah memiliki pengaruh ganda terhadap pemikiran Yunani melalui realitas dan mitosnya. Aspek realitas telah memungkinkan orang-orang Sparta menaklukan Athena lewat perang, sedangkan mitosnya mempengaruhi teori politik Plato serta pandangan banyak penulis sesudahnya.⁶⁴ Di bangsa Sparta setiap anak-anak yang lahir dipersiapkan mengikuti tradisi pendidikan militer, dengan catatan anak tersebut harus sehat. Sampai usia dua puluh tahun, semua anak laki-laki dilatih dalam satu sekolahan besar dengan tujuan membuat mereka berwatak keras, tahan derita, dan taat pada disiplin. Tidak ada gagasan muluk-muluk yang menyangkut budaya atau ilmu pengetahuan dalam pendidikannya, karena tujuan satu-satunya ialah menghasilkan serdadu yang mengabdikan sepenuhnya terhadap negara.

⁶⁴ Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, h. 127 terj. Sigit Jatmiko dkk

Lalu bagaimana dengan anak perempuan Sparta? Kedudukan anak-anak perempuan Sparta termasuk istimewa, mereka tidak tinggal di asrama sebagaimana kaum laki-laki dalam pendidikan militernya. Namun anak-anak perempuan Sparta juga harus menjalani latihan fisik yang serupa dengan laki-laki. Anak-anak perempuan Sparta jika kelak mereka dewasa dan berumah tangga dilarang menampakan emosi yang dianggap tidak berguna bagi negara. Mereka boleh menunjukkan kebencian pada seorang pengecut, dan akan dipuji bila si pengecut itu adalah anaknya sendiri; tetapi mereka tidak boleh memperlihatkan rasa sedih jika anaknya yang baru lahir dihukum mati karena dinilai tidak sehat, atau jika anak laki-lakinya gugur dalam peperangan.⁶⁵

Selama periode yang panjang bangsa Sparta telah berhasil mencapai tujuan utamanya, yakni terciptanya suatu ras yang terdiri dari serdadu yang sulit ditaklukan. Keberhasilan bangsa Sparta ini di topang dengan pendidikan militer yang diberlakukan sejak bayi-bayi dilahirkan. Mereka mempertahankan keunggulannya hingga tahun 371 SM, saat mereka dikalahkan oleh Thebes pada perang Leuctra, dan inilah akhir kejayaan militer mereka.

Orang-orang Sparta serta anggota Mapala X meskipun terpisah secara jarak dan zaman memiliki persamaan, bahwa mereka sama-sama menerapkan pendidikan militeristik. Jika bangsa Sparta menerapkan tradisi pendidikan militeristik guna menciptakan serdadu yang tangguh, sulit ditaklukan serta memiliki loyalitas terhadap

⁶⁵ Bertrand Russell, *Sejarah Filsafat Barat dan Kaitannya dengan Kondisi Sosio-Politik dari Zaman Kuno Hingga Sekarang*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2002, h. 130 terj. Sigit Jatmiko dkk

negara. Di Mapala X tujuan tradisi pendidikan militeristik hampir sama, yakni menciptakan anggota yang tangguh, bermental kuat, serta memiliki loyalitas terhadap organisasi. Pendidikan militeristik yang diterapkan Mapala X sebagaimana yang diungkapkan dalam Bab sebelumnya memiliki kohesi yang kuat dengan militer. Militer memiliki pendidikan yang dianggap sebagai salah satu rol model terbaik. Disamping pengaruh sosial politik, kesamaan medan antara militer dan kegiatan petualangan Mapala X juga turut menjadi pertimbangan mengapa Mapala X menggunakan model pendidikan militeristik.

Jika ditilik tujuan menggunakan pendidikan militeristik di Mapala X mengandung kebaikan, namun pendidikan militeristik di Mapala X juga sarat dengan kekerasan. Karl Marx menyebutkan, kekerasan adalah dukun beranak bagi setiap masyarakat lama yang tengah mengandung masyarakat baru. Kekerasan terus mengalami reproduksi, bahkan dalam konteks Indonesia yang terkenal ramah, reproduksi kekerasan terjadi sepanjang sejarah hingga konteks kekinian. Tindak kekerasan masih dengan mudah ditemui, di masyarakat, elit pemerintahan, polisi, militer, bahkan di lingkungan pendidikan seperti Mapala X sekalipun. Tindakan main hakim sendiri, seperti pengkroyokan massa baik secara spontan maupun terencana, perkelahian masal, pengerusakan fasilitas publik, dan sebagainya masih mewarnai pentas kehidupan berbangsa dan bernegara. Terkesan bahwa cara-cara penyelesaian konflik melalui kekerasan menjadi *mode of politic* yang melembaga dalam masyarakat.

Kekerasan sendiri memiliki definisi yang bermacam-macam. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain. Kekerasan juga dapat diartikan paksaan.⁶⁶ Melalui Pierre Bourdieu, kekerasan di definisikan secara berbeda. Berangkat dari pemikiran adanya struktur kelas dalam formasi sosial masyarakat yang merupakan seperangkat jaringan yang secara sistematis berhubungan satu-sama lain dan menentukan distribusi budaya (*cultural*) serta modal ekonomi (*economic capital*), maka ia memperkenalkan konsep kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik adalah sebuah model dominasi kultural dan sosial yang berlangsung secara tidak sadar (*unconscious*) dalam kehidupan masyarakat yang meliputi tindakan diskriminasi terhadap kelompok/ ras/ suku/ gender tertentu. Secara bergantian Bourdieu menggunakan istilah ‘kekerasan simbolik’ (*symbolic violence*), ‘kuasa simbolik’ (*symbolic power*) dan ‘dominasi simbolik’ (*symbolic dominance*) untuk merujuk hal yang sama.

Istilah kekerasan (*violence*) secara etimologi berasal dari bahasa latin “vis” yang artinya kekuatan, kehebatan, kedasyatan, dan kekerasan dan “latus” yang artinya membawa. Dari istilah tersebut berarti “vislotus” berarti membawa kekuatan, kehebatan, kedasyatan, dan kekerasan. Adapun dilihat dari arti secara terminologis berarti perbuatan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang menyebabkan cedera

⁶⁶ KBBI v1.1

atau matinya orang atau kelompok lain atau menyebabkan kerusakan fisik pada barang. Robert Audi mendefinisikan kekerasan sebagai serangan atau penyalahgunaan fisik terhadap seseorang, atau serangan, penghancuran, perusakan yang sangat keras, kasar, kejam, dan ganas atas milik sesuatu yang secara potensial dapat menjadi milik orang lain. Adapun Johan Galtung lebih menggunakan analisis berdasarkan aspek psikologis. Ia mengartikan kekerasan sebagai penyebab perbedaan antara potensial dan yang aktual. Kekerasan terjadi bilamana manusia dipengaruhi sedemikian rupa sehingga realisasi jasmani dan mental aktualnya berada di bawah realisasi potensial.⁶⁷

Dari kedua pengertian tersebut terdapat dua indikasi dari pengertian kekerasan, pertama kekerasan dalam arti sempit menunjuk pada tindakan yang berupa serangan, perusakan, penghancuran terhadap diri (fisik) seseorang maupun milik atau sesuatu yang secara potensial menjadi milik orang lain. Dengan demikian, kekerasan menunjuk pada tindakan fisik yang bersifat personal, artinya mengarah pada orang atau kelompok tertentu yang dilakukan secara sengaja, langsung dan aktual. Kedua kekerasan dalam arti luas, menunjuk pada tindakan fisik maupun tindakan psikologis, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang baik yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja, langsung atau tidak langsung, personal atau struktural. Yang dimaksud dengan kekerasan secara struktural adalah kekerasan yang dilakukan

⁶⁷ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar Edisi Ke Empat*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1990, h. 58.

oleh negara yang otoriter, sistem yang membuat kehidupan sosial tidak adil, dan sebagainya.

Sampai kini peristiwa kekerasan memang masih mewarnai pentas kehidupan politik masyarakat, sebagaimana yang terjadi di Mapala X. Lantas timbulah pertanyaan, apakah manusia itu pada dasarnya suka kekerasan? Apakah manusia dalam gennya memiliki dorongan untuk melakukan tindakan kekerasan? Ataukah kekerasan itu merupakan hasil yang dipelajari, melalui contoh-contoh atau tindakan yang terlihat dalam masyarakatnya. Dalam analisis Freud, ia mengonsepsikan agresi atau kekerasan tidak memainkan peran utama, namun *libido* lah (daya kehidupan) sebagai dorongan paling penting pada binatang dan manusia. Lebih lanjut setelah Perang Dunia I, pandangan Freud berubah sebagai tanggapan atas kekalutan yang telah ia saksikan di dunianya sendiri – yang telah mengalami guncangan hebat akibat penghancuran dalam Perang tersebut. Teorinyaa yang baru, seperti teori William McDougall tentang “naluri suka berkelahi,” mengandalkan adanya dorongan dasar kepada yang berlawanan dengan daya kehidupan – suatu keinginan bawah sadar untuk mati. Freud menamakan dorongan ini sebagai Thanatos, yang diambil dari bahasa Yunani yang berarti “kematian.” Apabila diarahkan kedalam, dorongan ini menyebabkan timbulnya keinginan masokhis untuk menyakiti diri sendiri. Bila diarahkan keluar, dorongan ini menjadi agresi atau kekerasan.⁶⁸

⁶⁸ Ronald H. Bailey. Terj. Suwargono Wirono, *Violence and Aggression. (kekerasan dan Agresi)*. Time-Life Books Inc. PT Tira Pustaka 1990, h. 43.

Kekerasan sendiri mungkin paradoks. Di satu sisi kekerasan mengakibatkan kerugian, namun di sisi lain mendatangkan keuntungan. Setidaknya kerugian bagi korban, dan keuntungan jika kekerasan dilihat dalam prespektif yang berbeda. Di negara-negara besar contohnya, akumulasi keuntungan salah satunya dilakukan melalui kekuatan bersenjata, atau dikenal dengan istilah penjajahan. Di negara pheri, atau negara berkembang, kekerasan terpaksa dilakukan rakyat dalam rangka memperjuangkan kemerdekaan. Sikap ini meskipun menggunakan cara-cara kekerasan, namun juga dimaknai sebagai tindakan patriotis.

Kekerasan juga dapat dimaknai sebagai cara hidup. Terlepas dari konteks Indonesia, di kalangan suku Yanomamo di Venezuela bagian selatan, agresi dan kekerasan merupakan suatu cara hidup. Di atas semua nilai lainnya, bangsa primitif ini mengutamakan *waiteri* – keganasan. *Waiteri* mulai dipupuk sejak lahir: jika ada bayi yang lahir perempuan, sehingga dengan demikian tidak cocok untuk menjadi seorang prajurit, si Ibu mungkin akan membunuhnya.⁶⁹ Kejadian serupa juga terjadi di masa kejayaan Sparta. Setiap bayi-bayi yang lahir dibawa oleh ketua adat. Jika bayi tersebut tidak memungkinkan menjadi seorang prajurit, maka ia akan ditenggelamkan kedalam sumur.

Suku Yanomamo dan bangsa Sparta memberikan gambaran bahwa penanaman nilai kekerasan yang dilegalkan dapat mempengaruhi suatu kebudayaan. Ronald H. Bailey mengungkapkan, anak-anak remaja Yanomamo dapat menyatakan

⁶⁹ Ronald H. Bailey. Terj. Suwargono Wirono, *Violence and Aggression. (kekerasan dan Agresi)*. Time-Life Books Inc. PT Tira Pustaka 1990 h. 43.

perasaan agresi mereka dengan bebas, bahkan orang tua menggoda anak kecil yang baru belajar berjalan untuk membangkitkan *waiteri*-nya dan kemudian tertawa bangga apabila anak itu memukul mereka. Anak-anak kecil Yanomamo sudah mendapatkan contoh sejak dini tentang kekejaman, kebuasan dan penghianatan. Mereka diajarkan untuk memperaktekan peran prajurit yang sudah ditentukan bagi mereka sejak lahir. Mereka menghafalkan mantra sakratulmaut yang harus diucapkan bila kelak mendapat luka yang mungkin mengakibatkan kematiannya. Suku Yanomamo meski berhasil memelihara persatuan, tetapi dengan banyak pengorbanan; banyak warga masyarakat mengalami cedera anggota badan serta cacat karena luka bakar, pergolakan terjadi terus-menerus dan warganya dikuasai pikirannya untuk menaruh curiga kepada hampir setiap orang.

Contoh lain, beberapa ribu kilometer di sebelah suku Yanomamo bermukim, terdapat negeri gersang yang ditinggali orang Indian Hopi. Berdasarkan catatan, orang Hopi memiliki prilaku yang hampir berlawanan dengan orang Yanomamo. Bagi anak laki-laki Hopi, tidak terbayangkan bila ia meninju ayahnya sendiri – atau siapa pun saja – sebab ayahnya atau setiap warga lingkungannya tidak mungkin memukul sesamanya. Anak-anak Hopi bersikap lemah lembut – dimanjakan menurut norma Barat – dan orang-orang dewasanya jarang mengalami kekerasan lebih dari kata-kata keras. Meski demikian, orang Hopi dapat marah juga tetapi jarang berkelahi. Mereka juga tidak mempunyai prajurit dan biasanya memang tidak terjadi

peperangan. Namun orang-orang suku ini mempertahankan desa-desa mereka dengan gagah berani apabila mendapat serangan dari suku lain.⁷⁰

Adanya perbedaan menyolok antara orang Yanomamo dengan orang Hopi menyakinkan kebanyakan para pakar bahwa perilaku kekerasan bukan hanya suatu kekurangan yang berakar pada sifat dasar manusia. Bukan suatu kegiatan yang sudah ditentukan secara genetik seperti halnya bernafas. Seandainya benar demikian, maka seluruh dunia kurang lebih akan seragam, karena pada kenyataannya tidak seragam, melainkan beranekaragam sesuai dengan kebudayaan. Oleh karena itu perilaku kekerasan merupakan hasil belajar seperti halnya segi-segi lain dalam kebudayaan.

Beberapa ahli psikologi berpendapat bahwa kekerasan sama sekali bukanlah hal yang ditetapkan secara genetik, melainkan sepenuhnya merupakan hasil belajar. Kebanyakan ilmuwan mengambil pandangan tengah. Mereka berpendapat bahwa ciri bawaan manusia membawa kecenderungan tertentu kearah pengungkapan emosi dalam bentuk kekerasan, tetapi kecenderungan ini kecil saja peranannya, karena dapat ditekan ataupun dikembangkan oleh masyarakat. Jadi, seberapa kerasnya perilaku seseorang bergantung hampir pada seberapa keras perilaku yang telah diajarkan kepadanya.⁷¹ Mengikuti argumentasi Ronald manusia belajar lewat peniruan, mengambil pola-pola perilaku yang mereka lihat di sekitar mereka, dan juga melalui proses umum yang disebut pembiasaan. Dalam pembiasaan ini hadiah dan hukuman –

⁷⁰ Ronald H. Bailey. Terj. Suwargono Wirono, *Violence and Aggression*. (kekerasan dan Agresi). Time-Life Books Inc. PT Tira Pustaka 1990 hal 44

⁷¹ *Ibid.*, h. 44.

ada yang tampak jelas, ada yang tidak kentara – mempengaruhi terbentuknya perilaku tertentu.

Sebuah contoh bahwa perilaku kekerasan merupakan hasil belajar adalah suku Samai. Suku Samai di Malaya merupakan bukti kuat bahwa kekerasan dan agresi bukanlah bentuk naluri perilaku, melainkan sebagai hasil belajar. Menurut ahli antropologi Robert Dentan yang hidup di tengah mereka selama satu tahun lebih, orang Samai belajar bersikap lembut sejak kanak-kanak. Anak kecil melihat perilaku lembut di sekeliling mereka. Meskipun berburu dan membunuh binatang untuk dimakan, mereka juga memelihara banyak binatang sebagai peliharaan dan untuk dijual; binatang ini mereka perlakukan dengan lemah lembut dan jarang sekali dibunuh. Sedangkan orang dewasa Samai tidak pernah saling memukul, dan kalau ada dua anak yang kelihatan hampir berkelahi, maka orang tua mereka cepat meleraikan.

Perilaku suka damai ini dapat berubah secara mencolok jika orang Samai dipindahkan ke suatu kebudayaan yang membuat mereka mengenal kekerasan. Pada tahun 1950-an, Inggris melatih mereka sebagai pasukan guna memerangi kaum Komunis di Malaya. Ketika beberapa orang terbunuh dalam pertempuran, kawan-kawan mereka bereaksi dengan amat garang. Mereka menjadi sedemikian agresif, bahkan seorang veteran perang mengatakan, “Kami membunuh, membunuh, dan membunuh. Yang kami pikirkan hanyalah membunuh. Kami benar-benar mabuk darah.” Namun ketika perang usai dan para prajurit Samai pulang, mereka dengan

cepat kembali ke cara hidup lama, tanpa kekerasan. Sehingga faktor yang menentukan perilaku mereka adalah hal-hal yang diajarkan kepada mereka.⁷²

Orang Yanomamo, orang Hopi serta orang Semai di Malaya setidaknya memberikan pengertian bahwa kekerasan yang terjadi di Mapala X merupakan hasil belajar. Dalam lingkup intra organisasi kekerasan dipelajari anggota melalui sesama anggota Mapala X, dan dalam lingkup eksternal, kekerasan dipelajari anggota melalui aparatus militer, organisasi Mapala yang militeristik, aktor yang memuja militer, dan sebagainya. Prosesi Diklatsar yang diselenggarakan oleh senior kepada junior selaku calon anggota juga menunjukkan bahwa fenomena kekerasan di Mapala X juga dapat dilihat sebagai sesuatu yang diwariskan serta dipelajari secara turun-temurun.

Menjadi anggota suatu kelompok baik Mapala X ataupun kelompok lainnya, tidak hanya meningkatkan gejolak perasaan perseorangan, tetapi juga memperbesar kemungkinan bahwa perasaan itu akan terwujud dalam tindakan. Tindakan tersebut tidak hanya menciptakan simbol-simbol yang membedakan antara anggota dan bukan anggota Mapala X. Atau perasaan *in group* dan *out group feeling* (perasaan orang dalam dan orang luar). Perasaan tersebut berpengaruh besar ketika teman sesama anggota kelompok mengalami konflik dengan seseorang atau anggota kelompok luar. Sebagai contoh, mari kita bergerak mundur di tahun 1770. Pada tanggal 5 Maret di malam hari, sejarah menuliskan telah terjadi pembantaian massal di Boston. Peristiwa berawal dari hal remeh temeh; seorang pemuda penduduk koloni Amerika menghina serdadu jaga Inggris di Kantir Pabean di Boston, dan anggota pasukan Baju merah itu

⁷² Ronald H. Bailey. *Ibid.*, h. 48.

membalas dengan menghantam pelipis pemuda tadi dengan senapannya. Pertikai tersebut menarik perhatian sehingga banya orang yang berdatangan ke kantor itu, dan kekerasan pun meluas bagaikan penyakit menular. Khalayak ramai mulai mencaci serdadu itu dan melemparinya dengan bola salju. Pasukan bantuan datang untuk menolong serdadu jaga, dan serombongan penduduk koloni mengejek para serdadu Inggris itu sehingga memancing mereka melepaskan tembakan. Salah seorang serdadu baju Merah dipukul hingga roboh; ia bangkit dengan marah dan menembakkan senapannya ke rah orang banyak. Para penduduk koloni mendekat, dan secara tak terelekan kekerasan meningkat sementara lebih banyak tembakan dilepaskan.⁷³

Sebenarnya peristiwa tersebut akan berakhir seandainya tidak ada satu faktor yang sangat penting; orang yang bermusuhan tadi adalah anggota kelompok, dan kekerasan yang mengakibatkan kelompok hampir selalu lebih mudah berkobar luas dari pada bentrokan antara perseorangan. Hukum ini berlaku entah yang terlibat itu penghuni koloni dan serdadu Baju Merah, ataupun pertkaiian yang terjadi antar TNI dan polisi beberapa bulan lalu. Kekerasan kelompok itu lebih mudah berkobar bukan hanya karena orang yang bermusuhan lebih banyak dan siap melukai, tetapi juga kerana prilaku orang lain di luar kelompok baik yang sifatnya remeh temeh ataupun karena permasalahan yang sebetulnya tidak berhubungan dengan kelompok.

Jika orang-orang yang ada dalam suatu kelompok cenderung melakukan tindak kekerasan, maka individu sebagai anggota mempunyai kemungkinan berbuat

⁷³ Ronald H. Bailey, *Ibid.*, h.109.

kekerasan. Sehingga seberapa keras tindakan kekerasan yang dilakukan melalui proses Diklatsar, ataupun dalam bentuk interaksi yang lain, juga akan menghasilkan tindakan kekerasan yang drajatnya mungkin sama, atau lebih besar. Kekerasan, yang terjadi dalam kelompok memberikan keadaan anonim pada anggotanya, sebetulnya selubung pelindung yang menghalalkan cara-cara kekerasan. Sebagaimana tindakan kekerasan yang dilegitimasi oleh Mapala X, dan bertahan hingga puluhan tahun. Kekerasan demi kekerasan juga berdampak pada cara anggota Mapala X melihat kekerasan. Kekerasan dalam lingkup organisasi dapat dipandang sebagai sesuatu yang biasa, atau normal. Selain itu kekerasan juga dimaknai sebagai salah satu cara terbaik guna mewujudkan tujuan-tujuan organisasi, seperti menciptakan anggota yang bermental dan memiliki fisik kuat.

Seiring dinamika organisasi, fenomena kekerasan yang terjadi di Mapala X juga dapat mengikis. Kematian yang terjadi di awal Tahun 2012 setidaknya menjadi titik balik Mapala X untuk mengevaluasi organisasi. Pengendalian sosial atau *social control* diberlakukan secara masif. Dari sana dihasilkan bahwa *pressure* yang biasa dilakukan dalam prosesi Diklatsar dikurangi porsinya guna meminimalisir potensi kecelakaan, ataupun *human error* yang menyebabkan kematian.

4.5 Pertarungan Argumentasi Praktik Militeristik dalam Diklatsar Mapala X.

Ketika sejumlah Mapala mempertanyakan dan meninggalkan praktik militeristik seperti halnya Aranyacala Trisakti⁷⁴, Mapala X masih mempertahankan hingga kini. Fenomena Mapala militeristik memang sudah lama diperbincangkan, baik di media, blok maupun komunitas pecinta alam. Banyak suara yang pro maupun kontra terhadap gaya pendidikan Mapala yang militeristik. Pro seperti yang dijelaskan di awal, bahwa pendidikan militeristik merupakan konsep yang sesuai untuk petualangan alam bebas. Namun argumentasi tersebut seolah mempunyai antitesisnya sendiri. Jika pendidikan militeristik digunakan untuk meminimalisasi resiko petualangan yakni kematian, namun kasus kematian yang terjadi menjadi bumerang, dan menuai kritik tajam. Kalangan kontra menilai dengan berbagai kasus kekerasan yang berujung kematian, pendidikan militeristik dirasa tidak sesuai untuk identitas seorang sipil yang bersatus mahasiswa. Dalam cara berpikir yang (tidak juga) baru ini, identitas Mapala yang beretiket pecinta alam dan juga mahasiswa, dikembalikan sebagaimana identitas atau jati dirinya sebagai mahasiswa. Demokratis, intelek, dan humanis⁷⁵.

⁷⁴Berdasarkan keterangan Desi anggota Mapala Aranyacala Trisakti pada tanggal 5 Desember 2012. Ia menyebutkan “sebenarnya dahulu kami juga menggunakan semi militer tetapi karena sebuah organisasi tidak akan berjalan tanpa adanya orang-orang yang mengeraknya banyak yang berinovasi dan menyesuaikan sistem dengan zaman, tapi yang terpenting adalah *safety first*”.

⁷⁵ Hasil wawancara dengan LP, salah satu pendiri Mapala X pada tanggal 7 Desember 2012.

Kasus kematian siswa yang terjadi di Mapala X mempertemukan sintesis dan antitesisnya dalam ruang lingkup organisasi Mapala X. Diskursus sosial intra organisasi terjadi. Orang-orang berdialog memberikan pandangan-pandangan atas pijakan yang diyakini. Sebagian mempersalahkan, membela, sebagian lain mengamini bahwa kasus kematian merupakan kesalahan semua generasi. Ditengah pertarungan argumentasi ini, sub bab ini menyuguhkan silang pendapat di antara kedua belah kubu, pro dan kontra.

4.5.1 Argumentasi Pro Pendidikan Militeristik dalam Diklatsar Mapala X

Secara historis tahun 1985 merupakan era pendidikan Mapala X berubah menjadi militeristik. Pendidikan militeristik dipahami sebagai model terbaik Mapala X, sekaligus kritik angkatan 1984 terhadap angkatan pendahulunya, angkatan 1981⁷⁶. Jika pada tahun-tahun pertama Mapala merupakan “angkatan main-main”, hanya pergi kemping, jambore, kesekolah-sekolah untuk mengadakan bakti sosial, dan perjalanan panjang yang dilakukan secara *fun*, di angkatan 84’ beberapa anggota Mapala X berkonvensi merancang pendidikan militeristik, yang kemudian diterapkan di angkatan 85’.

AS ketua Mapala X di tahun 1985 menerangkan bahwa perubahan model pendidikan di tubuh Mapala X karena pentingnya organisasi memiliki karakter yang khas. Karakter yang membedakan Mapala X dengan Mapala lainnya. Oleh karena itu

⁷⁶ Ringkasan wawancara dengan LP, pada tanggal 20 Januari 2013.

ia bersama dengan teman-teman Mapala X maupun di Mapala lainnya melakukan diskusi untuk merancang kegiatan Diklatsar. Melibatkan berbagai agen dan aktor sosial seperti tentara, organisasi pecinta alam militeristik (Wanadri dan Mahacita), serta aktor-aktor yang dianggap memuja militer⁷⁷.

Diklar Mapala X memang semi militer, model pendidikan itu yg paling pas untuk kegiatan petualangan. Tujuannya lebih ke fisiknya, alamkan keras makanya butuh ketahanan fisik, mental, disiplin, dan model yg paling cocok pendidikan semi militer...⁷⁸

Pendidikan yang keras dan kaku seperti militer dimaknai sebagai kebutuhan oleh aktor yang pro pada penerapan pendidikan militeristik. Dengan mengacu pada resiko petualangan alam bebas, pecinta alam dipersepsikan sebagai subjek yang keras, tidak lemah maupun lembek, serta harus memiliki disiplin tinggi. Oleh sebab itu ketika siswa melakukan kesalahan terdapat sanksi atau hukuman. Sanksi atau hukuman bertujuan untuk mendisiplinkan siswa, agar menyadari dan mengetahui resiko kesalahannya.

Kita sadar bahwa pecinta alam itu gak bisa lembek, harus disiplin, karna resiko berpetualangan itu...⁷⁹

Dulu awalnya militeristik banget, cuma sekrang disiplin militer aja yang diambil, dan sistem komandonya yg dipakai, tapi kemudian lebih di modifikasi lebih ke profesionalnya, misalnya saat merayap dia harus keadaan bersih (sehat), dan militer itu kenapa di adopsi karna doktrinisasinya kuat, terdapat asas-asas yang penting seperti menghormati senior, solidaritas,

⁷⁷ Ringkasan wawancara dengan TH pada tanggal 20 Januari 2013.

⁷⁸ Data wawancara dengan IB, pada tanggal 11 Januari 2012

⁷⁹ Ringkasan wawancara dengan AS, ketua Mapala X era 80-an. Tanggal 30 Maret 2013.

loyalitas terhadap organisasi, dan militer punya control yg kuat, dengan demikian sistem pendidikan militer positif untuk di adopsi...⁸⁰

Model pendidikan militeristik dinilai sesuai untuk kegiatan avontur. Avontur merupakan kegiatan petualangan alam bebas yang sarat resiko; kecelakaan ringan, sedang, dan memungkinkan membawa penggiatnya ke dalam titik nadir kematian. Oleh sebab itu dibutuhkan disiplin tinggi, dan disiplin terbaik bagi anggota Mapala X adalah disiplin militer, bukan disiplin sipil. Disiplin sipil meskipun anggota Mapala X adalah mahasiswa yang juga bagian dari sipil, dirasa tidak efektif untuk kegiatan petualangan alam bebas. Melalui disiplin militer dengan mekanisme yang kaku dan keras seseorang diharapkan memiliki kepatuhan⁸¹.

Kita benar-benar dibuat di titik nadir kehidupan, lebih di setting dekat dengan kematian, kondisi gak nyaman, tapi di situ kita dituntut untuk slalu berpikir sigap dan tepat..⁸²

Melalui pendidikan militeristik yang tertuang dalam Diklatsar, siswa diberikan berbagai stimulus. Stimulus tersebut meliputi praktek tindakan represif secara fisik dan psikis, dan bertujuan untuk mengeluarkan siswa dari zona nyaman. Hadirnya kata *push* atau *pressure* secara verbal dalam prosesi Diklatsar merupakan simbol bahasa yang kemudian menghasilkan tindakan sosial atau fisik baik dari anggota Mapala (instruktur) maupun siswa sebagai hasil dari stimulus (respon). Tindak represif merupakan praktek hegemoni sosial yang dilakukan Mapala sebagai

⁸⁰ Data wawancara dengan WDD, pada tanggal 15 Desember 2010.

⁸¹ Data hasil wawancara dengan NV, anggota Mapala X pada tanggal 18 November 2012.

⁸² Ringkasan hasil wawancara dengan DN, anggota Mapal X pada tanggal 18 November 2012.

agen sosial, dan dimaknai sebagai cara yang efektif, untuk membentuk karakter dan mentalitas yang tangguh.

Saat aplikasi akhir Diksar, kita keluar dari zona nyaman, kita push siswa, nah pada saat kondisi seperti itu munculah karakter asli, ada yang egois segala macam, nah jika begitu kita push lagi, tapi kita jelaskan kenapa di push, ya tujuan di pushkan untuk pembentukan mental supaya gak cengeng, dan berpikir cepat bertindak tepat...⁸³

AS mengungkapkan Diklatsar Mapala X yang militeristik memberikan banyak manfaat. Ia memberikan dua contoh. Contoh pertama, seorang anggota Mapala X angkatan 1986 bernama EN memiliki rasa takut yang tinggi dengan gelapnya malam, namun kini berdasarkan keterangan AS, EN seorang perempuan yang tangguh, dalam usianya yang tidak lagi muda menggabungkan diri dalam ekspedisi wanita untuk mendaki salah satu puncak tertinggi dunia. Contoh kedua, seorang mahasiswa di Fakultas Ilmu Keolahragaan (FIK) bernama CB bergabung dengan Mapala X dalam pendakian Gunung Gede Pangrango. Ia membawa satu termos kopi, dan hanya diperuntukan untuk dirinya sendiri. Hanya untuk dirinya sendiri merupakan simbol bahasa yang menerangkan keegoisan manusia. Di Mapala X hal bagi AS itu tidak berlaku, Mapala X dalam Diklatsar di didik harus memiliki rasa *brotherhood*/ solidaritas, simpati dan empati yang tinggi. Oleh karena itu menurut AS pecinta alam adalah orang-orang yang memiliki karakter yang tenang, bertindak cepat dan tepat, serta solidaritasnya sangat tinggi.

⁸³ Data hasil wawancara dengan ZU, komandan Diklatsar XXXI pada tanggal 18 November 2012

Itulah yang sebelumnya saya bilang, kita bisa tenang menghadapi persoalan, punya rasa empati yang tinggi, cepet tanggep, dan solidaritasnya tinggi. Ada cerita namanya Candra Budiman dia orang FIK, dia bawa kopi saat kita mendaki, nah kita minta tuh kopinya, nah terus biar kita gak minta lagi dia ludahilah kopinya tapi tetep kita minta lagi, dan terakhir dia celupkanlah kaos kakinya ke dalam kopinya, tetep tuh kita minta lagi, ahahaha. Artinya kita pecinta alam ada rasa kebersamaan yang tinggi, karna dalam perjalanan kita juga secara gak langsung belajar, misalnya ada salah satu teman tim kita sakit, gak mungkinkan kita tinggali dia sendirian, kita bantu dia, kita kasih obat dia...⁸⁴

Lalu bagaimana dengan peristiwa kematian dan kecelakaan yang terjadi sepanjang Diklatsar? Sebagai anggota perintis PH dan AS menekankan masih relevan model pendidikan Mapala X tetap diberlakukan. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Asih sebagai berikut:

Masih setuju karna kalau tidak akan konyol sendiri nantinya. Pendidikan militeristik itu kan tujuannya supaya kita tahan banting, gk cengeng, cepet tanggep, dan apapun keadaannya sesulit apapun tetep dinikmati, di syukuri, dan dihadapi....⁸⁵

4.5.2 Argumentasi Kontra Pendidikan Militeristik dalam Diklatsar Mapala X

Jika praktek tindakan represif sebagaimana disebutkan diatas sebagai tindakan pembetulan mental, karakter, serta meminimalisasi resiko petualangan di alam bebas, namun sepanjang Mapala X berdiri terdapat sepuluh orang meninggal dunia, enam diantaranya adalah siswa, dan empat diantaranya adalah anggota Mapala X⁸⁶. Data terakhir pada tahun 2012 di Diklatsar angkatan XXXI menyebutkan bahwa siswa

⁸⁴ Cuplikan wawancara dengan AS, Ketua Mapala X tahun 1985,

⁸⁵ Data wawancara dengan AS, anggota perintis Mapala X, pada tanggal 18 Januari 2012

⁸⁶ Ringkasan hasil wawancara dengan BD, salah satu anggota pendiri Mapala X pada tanggal 20 Januari 2013

meninggal disebabkan karena diare dan dehidrasi parah⁸⁷. Peristiwa tersebut sempat membuat anggota pendiri geram. BD adalah salah satu anggota pendiri yang mengkritik praktek pendidikan Mapala X. Ia menginginkan Mapala X dibubarkan atau diperbaiki sistem pendidikannya. Namun PH dan AS merupakan aktor-aktor yang masih mendukung pendidikan militeristik di Diklatsar.

Ini yang saya bilang karna sekarang teknologi udah canggih, jadi sering menyepelekan. Soal nyawa itu paling utama, makanya dalam kegiatan itu kita harus perhatikan minum, makan, keselamatan. Pernahkan ada yang meninggal karna ketiban pohon, nah makanya klo kita dateng kesuatu tempat itu izin dulu, bukannya apa-apa yah, memang gak logis tapi itu perlu dilakukan. Nah ini persiapan mentalnya kurang, kalau duluan kita lebih primitif, karna alat-alat susah, mahal, jadi kita menciptakan alat, jadi kita lebih teliti, lebih wasapada jangan sampai kecelakaan, nah jadi kita lebih survive. Meski begitu saya masih setuju dengan penerapan pendidikan militeristik, karna kalau tidak akan konyol sendiri nantinya. Pendidikan militeristik itu kan tujuannya supaya kita tahan banting, gak cengeng, cepet tanggep, dan apapun keadaannya sesulit apapun tetep dinikmati, di syukuri, dan dihadapi⁸⁸.

Nada pro yang disanjung oleh AS diatas ternyata ditentang oleh beberapa pihak yang juga berasal dari kelompok pelopor di awal tahun berdirinya. Menurut BD, LP, serta TN selaku anggota pendiri, terkait dengan disiplin mereka sangat setuju, tetapi penyelenggaraan dan cara-cara mendisiplinkan itulah yang ia sangat tentang. Tujuan tidak membenarkan cara. Untuk menjadi disiplin dan berkarakter tangguh masih banyak cara yang humanis untuk dilakukan.

⁸⁷ Data hasil wawancara dengan RM, anggota Mapala X pada tanggal 19 November 2012.

⁸⁸ Ringkasan hasil wawancara dengan AS, mantan Ketua Mapala X era 80-an. Pada tanggal 30 Maret 2013.

“..gw bingung coy, jadi dua minggu jalan panjang, jalan kaki, jadi begitu kalo dah pada lemes, di suruh terusin jalan, gak ada dokter, gak di cek, begitu orang matanya dah putih, dah ketakutan..”⁸⁹

TN kembali menambahkan hal yang janggal tentang penyelenggaraan kekerasan dalam Diklatsar Mapala X. Pola militeristik yang diadopsi melalui Wanadri dan Kopasus pada tahun 1985 menjadi kebanggaan organisasi karena telah membuat Mapala X memiliki karakter yang khas dan berbeda dengan yang lain. Tapi apakah pada prakteknya dilapangan, penerapan militeristik dalam organisasi mahasiswa sepenuhnya sesuai dengan karakter mahasiswa. Jika Tentara harus berjibaku dengan latihan yang berat dan kasar, hal itu dirasakan memang sudah sewajarnya dan semua orang yang terlibat sudah menyadari dan memahaminya sejak awal bergabung dengan korps masing-masing⁹⁰.

Ketika mahasiswa sebagai kalangan intelektual justru menganggap militeristik adalah cara yang paling tepat untuk mencapai tujuan organisasi, hal ini dirasakan sudah menciderai status intelektual seorang mahasiswa. Budi kembali berargumen tentang akibat penerapan militeristik dalam Mapala X yang asal-asalan. Bahwa dalam tubuh militer sendiri semua perangkat dan aturan pendidikan dasarnya dipersiapkan sangat matang dan detail. Hal ini tentu saja untuk mengurangi resiko keselamatan yang dapat muncul akibat kelalaian atau ketidak disiplin. Namun yang terlihat di Mapala X justru tidak demikian terorganisirnya.

⁸⁹ Ringkasan wawancara dengan BD, pendiri Mapala X pada tanggal 29 Desember 2012.

⁹⁰ Ringkasan wawancara dengan TH, pada tanggal 29 Desember 2012.

“... kalo tentara kan di gampar wajar, tentara dipukul dari pada ditembak musuh si wajar daripada mereka mati, mereka kan ada musuhnya wajar, nah kita apa? Nah dulu itu, Itu di bawa sama mapala ikip bandung, Endi pendi jadi menerapkan pola-pola wanadri, tapi dari situ sepanjang dia gk bawa pola-pola militeristik sayagk peduli gitu, karena itu berisiko gede, nah ada orang yang mati kalo gak salah enam saat diksar, sepeluh kasus, 4 kecelakaan karena kerubuhan pohon, ada yang mati karena bener mati, waktu mati itukan saya omongin, hati-hati, karena apa, orang tentara kalo org dah payah itu ditarik, ini terus-trusssan di push, ditentara ada dokternya, itulah yang saya gak suka, gak satu paham, gak ada mutunya kayak gitu. Dulukan gak ada militernya, meski dulu kita belajar survival d militer.”⁹¹

4.6 Penutup

Di Mapala X praktik militeristik dianggap sebagai *roll* model terbaik. Pengadopsian praktik militeristik berdasarkan analisa penulis, tidak hanya dikarenakan pilihan pragmatis, terdapat aspek tersembunyi sebagaimana konsepsi Mead. Aspek tersembunyi tersebut mengurai sejarah panjang, dan berkait-kaitan dengan kondisi sosial politik pemerintahan dimana Mapala X tumbuh dan berkembang. Konteks sosial politik berperan besar terhadap fenomena praktik militeristik di Diklatsar Mapala X. Pasalnya Mapala X tumbuh besar ketika rezim Orde Baru dikenal sebagai negara militer birokratik. Historiografi, doktrin nilai-nilai 1945, dan P4 adalah sedikit diantara praktik dominasi militer dalam usaha melanggengkan kekuasaan.

⁹¹ Ringkasan wawancara dengan BD, anggota pendiri Mapala X pada tanggal 29 Desember 2012.